

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DALAM  
MENGKOORDINASIKAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN  
DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN PANGKALAN LESUNG**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Pemerintahan Progam Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**KURNIAWAN**  
**NPM : 147310187**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2019**

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

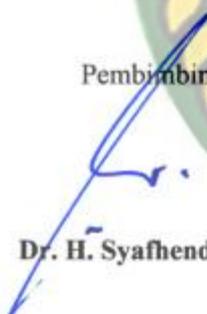
Nama : Kurniawan  
NPM : 147310187  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S1)  
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji sidang ujian koferehensif.

Pekanbaru, 11 Januari 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Syafhendry M.Si

  
Syaprianto S.Sos.,M.IP

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

  
Budi Mulianto S.IP.,M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Kurniawan  
NPM : 147310187  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Sarjana Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komferehensif Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru 14Februari 2019

Ketua

Sekretaris

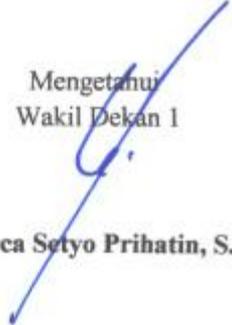
  
**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si**

  
**Nina Yustiani, S.IP, M.Si**  
Anggota

  
**Dita Firdian Adni, S.IP, M.IP**  
Anggota

  
**Syaprianto, S.Sos, M.IP**

Mengetahui  
Wakil Dekan I

  
**H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 68/UIR-FS/KPTS/2019**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Kurniawan**  
N P M : 147310187  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Pangkalan Lesung.

1. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
  2. Nina Yuslaini, S.IP., M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
  3. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP Sebagai Anggota merangkap Penguji
  4. Dr. H. Syafhendry, M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
  5. Syaprianto, S.Sos., M.IP Sebagai Anggota merangkap Penguji
  6. Agung Wicaksono, MPA Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 15 Februari 2019  
An. Dekan

**Dr. H. Panca Setvo Prihatin, S.IP., M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :  
1. Yth. Bapak Rektor UIR  
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR  
3. Yth. Ketua Prodi .....  
4. Arsip -----sk.penguji-----

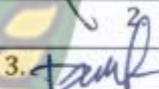
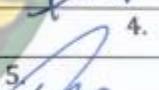
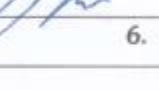
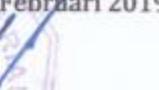
## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

### BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 68 /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 13 Februari 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 14 Februari 2019 jam 13.00 – 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Kurniawan  
NPM : 147310187  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pangkalan Lesung.

Nilai Ujian : Angka : "84" ; Huruf : " B "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda/Tangan
1.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Nina Yuslimi, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dita Fisdian, Adni, S.IP., M.IP.	Anggota	3. 
4.	Dr. H. Syafhendry, M.Si.	Anggota	4. 
5.	Syaprianto, S.Sos., M.IP.	Anggota	5. 
6.	Agung Wicaksono, MPA	Notulen	6. 

Pekanbaru, 14 Februari 2019

An. Dekan,

**H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.**

Wakil Dekan I Bid. Akademik

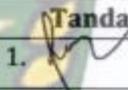
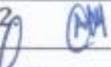
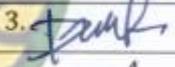
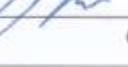
## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

### BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 68 /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 13 Februari 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 14 Februari 2019 jam 13.00 – 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

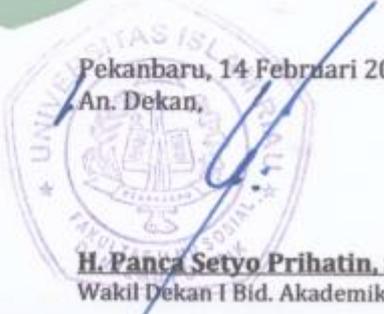
Nama : Kurniawan  
NPM : 147310187  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pangkalan Lesung.

Nilai Ujian : Angka : "84" ; Huruf : " B "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda/Tangan
1.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Nina Yuslimi, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dita Fisdian, Adni, S.IP., M.IP.	Anggota	3. 
4.	Dr. H. Syafhendry, M.Si.	Anggota	4. 
5.	Syaprianto, S.Sos., M.IP.	Anggota	5. 
6.	Agung Wicaksono, MPA	Notulen	6. 

Pekanbaru, 14 Februari 2019

An. Dekan,

  
H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

Wakil Dekan I Bid. Akademik

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

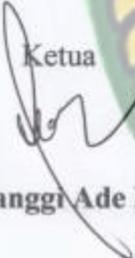
Nama : Kurniawan  
NPM : 147310187  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah

Pekanbaru, 14 Februari 2019

An. Tim Penguji  
Sekretaris

Ketua

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

  
Nina Yastlaini, S.IP, M.Si

Turut Menyetujui,

Mengetahui  
Wakil Dekan 1

  
H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua

  
Budi Mulianto., S.IP. M.Si

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurniawan  
Nomor Mahasiswa : 147310187  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (SI)  
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butil 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Januari 2019  
Pelaku pernyataan,


Kurniawan

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan”** merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana strata satu (S1) pada Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan semangat pada penulis baik moral maupun materil guna menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr H. Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor UIR yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

3. Bapak H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Bapak Budi Muliando, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan saran beserta kritik sedari awal permulaan pengajuan judul skripsi ini sehingga sampai pada skripsi yang layak diseminarkan.
5. Bapak Dr. H. Syafhendry M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dalam meluang waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Syaprianto, S.Sos., M.IP selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam meluang waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmunan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini dan Bapak/Ibu serta Saudara/Saudari Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran administrasi penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta atas kerja keras dan do'a restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.
9. Teman-teman seperjuangan terutama Tutiyani putri S.IP, Titis sukma anggreami S.IP, Syarwani Hk, dan yang tersayang Isti yensi Lensana Raya

SE Dan kawan-kawan Ilmu Pemerintahan kelas IP C Angkatan 2014 yang sama-sama menuntut ilmu di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 11 Januari 2019

Penulis

Kurniawan



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	II
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	III
BERITA ACARA UJIAN KONPREHANSIF .....	IV
PENGESAHAN SKRIPSI.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI .....	VII
DAFTAR TABEL .....	IX
DAFTAR GAMBAR.....	XI
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	XII
DAFTAR LAMPIRAN .....	XIII
ABSTRAK .....	XIV
ABSTRACT .....	XV
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	11
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN .....</b>	<b>12</b>
A. Studi Kepustakaan.....	12
1. Konsep Analisis.....	12
2. Konsep Pemerintahan.....	13
3. Konsep Pelaksanaan.....	15
4. Konsep Tugas.....	16
5. Konsep Camat.....	17
6. Konsep Koordinasi.....	19
7. Konsep Ketentraman.....	29
8. Konsep Ketertiban.....	30
B. Kerangka Pikiran .....	36
C. Konsep Operasional .....	36
D. Operasional Variabel .....	38
E. Teknik Pengukuran .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Tipe Penelitian .....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Populasi dan Sampel .....	42
D. Teknik Penarikan Sampel .....	43
E. Jenis dan Sumber Data.....	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Analisa Data.....	46
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	47

<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Gambar Umum Kabupaten Pelalawan .....	48
B. Gambar Umum Kecamatan Pangkalan Lesung .....	50
<b>BAB V HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Identitas Responden .....	52
B. Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan .....	55
C. Penghambat dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.....	76
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Data jumlah anggota linmas dan poskamling.....	6
I.2	Jumlah Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban.....	7
I.3	Data kegiatan camat .....	8
II.2	Konsep Operasional Variable Penelitian Tentang Analisa Pelaksanaan Tugas Camat.....	38
III.1	Jumlah Populasi Dan Sampel Unsur Pimpinan Kecamatan Dan Aparatur Pemerintahan.....	43
III.2	Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Camat.....	47
V.1	Identita Responden Berdasarkan Usia.....	52
V.2	Identitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	53
V.3	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	54
V.4	Tanggapan Responden Unsur Masyarakat Mengenai Pertemuan Resmi.....	55
V.5	Tanggapan Responden Unsur Pegawai Kantor Camat Pangkalan Lesung Mengenai Pertemuan Resmi .....	57
V.6	Tanggapan Responden Unsur Masyarakat Mengenai Mengangkat Suatu Tim.....	60
V.7	Tanggapan Reesponden Unsur Pegawai Kantor Camat Pangkalan Lesung Mengenai Mengangkat Suatu Tim.....	61
V.8	Tanggapan Responden Unsur Masyarakat Mengenai Membuat Buku Pedoman.....	64
V.9	Tanggapan Responden Unsur Pegawai Kantor Camat Pangkalan Lesung Mengenai Membuat Buku Pedoman.....	66
V.10	Tanggapan Responden Unsur Masyarakat Mengenai Mengadakan Pertemuan Informal .....	69
V.11	Tanggapan Responden Unsur Pegawai Kantor Camat Pangkalan Lesung Mengenai Pertemuan Informal .....	71

- V.12 rekapitulasi tanggapan responden mengenai pelaksanaan tugas camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan pangkalan lesung .....

74



## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar II.1:	Kerangka pikir dari penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Camat.....	36
Gambar IV. 1:	Struktur Organisasi Kantor Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.....	51



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisisioner ( Untuk Responden Unsur Masyarakat Dan Unsur Pegawai Kantor Camat ) .....	82
2. Daftar Pedoman Wawancara Penelitian ( Untuk Camat Dan Kepala Kapolsek Kecamatan Pangkalan Lesung.....	88
3. Daftar Telly Data Penelitian Tetang Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Pangkalan Lesung.....	90
4. Photo Dokumentasi Hasil Observasi Peneliti.....	93
5. Surat rekomendasi No 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/15003 dari badan kesatuan bangsa dan politik provinsi riau.....	97
6. Surat rekomondasi No 504/DPMTSP/2018/17 dari Dinas penanaman modal dan pelayan terpadu satu pintu.....	98
7. Surat rekomendasi No 070/UM/2018/06 kantor camat pangkalan lesung.....	99

**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DALAM  
MENGKOORDINASIKAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN  
DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN PANGKALAN LESUNG  
KABUPATEN PELALAWAN**

**ABSTRAK**

**Oleh**

**Kurniawan**

**Kata Kunci** : Pertemuan Resmi, Informal, Mengangkat Tim Dan Buku Pedoman

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan telah terjadi keresahan yang dialami masyarakat ditimbulkan para pemain-pemain judi dalam kurun waktu satu tahun. Hal ini tentunya ada kaitan dengan organisasi yang melaksanakan tugas ini, yakni Camat Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Adapun fungsi adapun fungsi camat dalam dalam pasal 224 ayat (1) No 23 tahun 2014 adalah sebagai menyelenggarakan urusan pemerintah umum serta mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Namun dalam hal ini fungsi program Kecamatan Pangkalan Lesung ini terlihat masih mengalami permasalahan yang dapat dilihat dari meningkatnya tingkat keresahan yang di alami masyarakat di Kecamatan Pangkalan Lesung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tugas Camat Pangkalan Lesung serta untuk mengetahui hambata-hambatan yang dihadapi Camat Pangkalan Lesung. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kuantitatif, lokasi dalam penelitian ini akan penulis lakukan dikantor Kecamatan Pangkalan Lesung dan Kantor Kapolsek Pangkalan Lesung. Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan pegawai kantor Camat Pangkalan Lesung. Jumlah pegawai pada kantor Camat Pangkalan Lesung sebanyak 44 orang peneliti juga melibatkan 50 orang Tokoh Masyarakat yang ada di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Data penelitian ini diambil dengan cara menyebarkan kuisisioner dan kemudian dikumpulkan dan dianalisa sesuai permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar indicator pertanyaan mengenai Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan masih dikategorikan “cukup baik” ini dilihat dari 4 (empat) indikator yang penulis gunakan yaitu mengadakan pertemuan resmi, mengangkat suatu tim, membawa buku pedoman dan mengadakan pertemuan informal.

**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DALAM  
MENGKOORDINASIKAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN  
DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN PANGKALAN LESUNG  
KABUPATEN PELALAWAN**

**ABSTRAK**

**Oleh  
Kurniawan**

Keywords: Official Meetings, Informal, Lifting Team Dan Guide book

Based on data obtained from Pangkalan Lesung Subdistrict, Pelalawan Regency, there has been anxiety that has been experienced by the community caused by gambling players within one year. The function of the sub-district function in article 224 paragraph (1) No 23 of 2014 is to organize public government affairs and coordinate efforts to organize peace and public order, but in this case the function of the Pangkalan Lesung District program is still experiencing problems that can be seen from the increasing level of anxiety experienced by the community in Pangkalan Lesung District. The purpose of this study was to find out the Task of the Head of Pangkalan Lesung District and to find out the obstacles faced by the Pangkalan Lesung Sub-District Chief. The type of this research is the type of quantitative descriptive research, the location of the research will be conducted at the office of the Pangkalan Lesung District and the Pangkalan Lesung Police Chief Office. The population in this study were all employees of the Pangkalan Lesung sub-district office. The number of employees in the Camata Pangkalan Lesung office as many as 44 researchers also involved 50 Community Leaders in the District of Pangkalan Lesung, Pelalawan Regency. The data of this study were taken by distributing questionnaires and then collected and analyzed according to the problem. Based on the results of the study, the majority of the question indicators regarding the Analysis of the Camat's Task Implementation in Coordinating the Implementation of Public Peace and Order in Pangkalan Lesung Subdistrict, Pelalawan District, are still categorized as "good enough". a team, carrying a guidebook and holding an informal meeting.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban masyarakat dalam menjalani kehidupannya secara wajar. Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu penyelenggaraan otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 di jelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana di jelaskan pada ayat (2) huruf a, sebagai berikut: (2) perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas
5. Badan
6. Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, camat juga berperan sebagai Kepala Wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti Daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintahan di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentramandanketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum di laksanakan oleh pemerintahan Desa/Kelurahan atau instansi pemerintahan lainnya di wilayah kecamatan.

Adapun urusan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dibedakan atas dua jenis dalam Undang-Undang 23 pasal 9 yaitu:

1. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan Pemerintahan Absolut, urusan Pemerintahan Konkuren dan urusan Pemerintahan Umum
2. Urusan Pemerintahan Absolut sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

3. Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota
4. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksana Otonomi Daerah
5. Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai Kepala Pemerintahan

Berdasarkan pasal 10 huruf C Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2018 tentang kecamatan, camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi kedudukan, tugas dan wewenang camat yaitu: mengoordinasikan upaya penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;

Dari penegasan pasal 10 salah satu tugas umum camat adalah mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban. Pentingnya tugas-tugas ini dilakukan Camat mengingat tidak semua aturan-aturan hukum yang ada dalam masyarakat diatur dalam Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) yang penegakan aturan dilakukan kepolisian, tapi aturan-aturan yang tersisa oleh pemerintah dikategorikan urusan pemerintahan umum yang menjadi

tugas pemerintah yang dalam hal ini diserahkan ke camat. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah kecamatan beserta jajarannya melaksanakan ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan wilayahnya masing-masing. Pada hakikatnya tujuan utama dibentuknya pemerintahan (Negara) adalah untuk menjaga sistem ketertiban dan menciptakan ketentraman, dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar.

Ketertiban merupakan salah satu syarat utama dalam mensukseskan pembangunan. Menurut Madjloes (dalam Rauf,2005:6) Ketertiban adalah sebagai suatu asas tata kehidupan dan hasil-hasil dari ketentuan-ketentuan, baik secara tertulis yang disepakati dan dilaksanakan bersama. Ketentraman berasal dari kata tentram, dalam kamus Bahasa Indonesia tentram diartikan sebagai kondisi yang aman, tenang, sejahtera dan makmur. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa ketentraman mengarahkan kepada bagaimana pemerintah mampu untuk memberikan dan membentuk rasa aman bagi masyarakatnya sehingga akan menimbulkan suasana yang tenang dalam setiap kegiatan dan aktifitas yang dilakukan masyarakat yang akhir wujud dari kesejahteraan dan kemakmuran akan dapat tercapai.

Ketertiban merupakan kata dasar dari tertib, dimana didalam Kamus Bahasa Indonesia tertib diartikan sebagai kondisi yang teratur dan rapi atau kondisi adanya peraturan yang baik. Jika diartikan secara luas dengan mengacu kepada fungsi pemerintahan, maka ketertiban disini dapat kita terjemahkan sebagai upaya yang harus dilakukan pemerintah agar terbentuknya kondisi yang

teratur dan rapi ditengah-tengah masyarakat melalui penerapan berbagai peraturan dan program-program pemerintah yang baik.

Ketertiban saling berkaitan dengan ketentraman, dimana ketertiban dan ketentraman adalah dua keadaan yang dapat dirasakan bersama (serentak) dalam suatu waktu. Ketentraman sebagai suatu keadaan adalah akibat daripada adanya ketertiban, tanpa adanya terlebih dahulu ketertiban orang akan sia-sia mengharapkan, maka dengan sendirinya akan dirasakan adanya ketentraman. Demikian bahwa sesungguhnya ketentraman adalah akibat dari terlaksananya ketertiban dengan baik, dimana ketertiban disitu ada ketentraman. Untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam suatu wilayah perlu adanya koordinasi yang baik.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan masalah sensitif dikarenakan melibatkan banyak pihak karena ini masalah ketentraman dan ketertiban menjadi kewenangan pemerintah, karena tujuan diadakannya pemerintahan adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan koordinasi dibidang ketentraman dan ketertiban.

.Berikut ini adalah jumlah linmas dan pos kamling di Kecamatan Pangkalan Lesung tahun 2017-2018

**Tabel 1.1 Data Jumlah Anggota Linmas Dan Poskamling Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan**

No	Desa/Kelurahan	Linmas		Pos Kamling	
		2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Pangkalan Lesung	8	8	13	13
2	Dusun Tua	8	8	5	5
3	Genduang	8	8	5	5
4	Mayang Sari	7	7	12	12
5	Rawang Sari	8	8	15	15
6	Mulya Subur	8	8	4	4
7	Sri Mulya	8	8	13	13
8	Sari Makmur	8	8	7	7
9	Pesaguan	5	5	3	3
10	Tanjung Kuyo	8	8	4	4
Jumlah		76	76	81	81

**Sumber : Camat Pangkalan Lesung**

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat jumlah linmas dan poskamling yang ada dikecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan pada tahun 2017-2018 di 10 desa tidak ada peningkatan .

Beberapa permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di kecamatan Pangkalan Lesung dilihat dari tahun 2017 sampai dengan 2018 dapat di lihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel I.2 Jumlah Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pangkalan Lesung.**

No	Jenis Permasalahan	Tahun dan Jumlah Penduduk	
		2017	2018
1	Perjudian	6	8
2	Laka Lantas	21	18
3	Pencurian	7	10
4	Persetubuhan	3	3
5	Pelanggaran narkotika atau obatan terlarang	4	3
6	Penggelapan	1	0
7	Kebakaran rumah	1	0
8	Peras/ancaman	2	0
9	Pengeroyokan	2	0
10	Penganiayaan	3	0
	<b>Jumlah</b>	50	42

**Sumber : Camat Pangkalan Lesung**

Dari data jumlah permasalahan ketentraman dan ketertiban umum diatas terlihat bahwa di Kecamatan Pangkalan Lesung pada Tahun 2017 terdapat 6 orang dan pada Tahun 2018 terdapat 8 orang kasus perjudian. Dan kasus Laka Lantas di Pangkalan Lesung pada tahun 2017 terdapat 21 orang dan pada Tahun 2018 terdapat 18 kasus / orang. Dan kasus pencurian di Kecamatan Pangkalan Lesung pada tahun 2017 terdapat 7 orang dan pada tahun 2018 ada 10 orang pada kasus pengeroyokan pada tahun 2017 terdapat 2 kasu pengeroyokan dan pada tahun

2018 tidak ada terjadi kasus pengeroyokan dikecamatan pangkalan lesung, pada kasus pelanggaran narkoba atau obat terlarang tahun 2017 terdapat 4 kasus sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 3 kasus. dari data diatas dapat kita lihat jumlah permasalahan yang ada dikecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan pada tahun 2017 sebanyak 50 kasus dan pada tahun 2018 mengalami penurun menjadi 42 kasus.

Berikut ini adalah data kegiatan harian camat pangkalan lesung kanupaten pelalawan tahun 2017 – 2018

**Tabel I.3 data kegiatan camat Pangkalan Lesung tahun 2017-2018**

No	Jenis Kegiatan	Tahun	
		2017	2018
1.	Melaksanakan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat	211	192
2.	Menghadiri Lomba Masak Ikan	1	1
3.	Menghadiri Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Pkk	-	1
4.	Menghadiri Rapat Pembahasan Pbb	1	1
5.	Menghadiri Rapat Tim PORA Tingkat Kecamatan	1	1
6.	Menghadiri Rapat Realisasi Fisik 2 Keunagan Triwulan II	1	1
7.	Menghadiri Acara Puskesmas	3	5
8.	Deklarasi Pemilu Damai	-	1
9.	Menghadiri Rapat Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	1
10.	Menghadiri Acara Rekor Camat Dan Lurah	-	2
11.	Penyerahan Sertifikat Leveling SPIP Level 3	-	1
12.	Rapat Koordinasi	3	-

	Permasalahan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		
13.	Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan	1	-
14.	Mengikuti Acara Sosialisai Laporan LHKPN	1	1
15.	Membahas Masalah Kelanjutan Penanganan Wisata Air Panas	1	-
16.	Melakukan Konsultasi Masalah Anggaran Perubahan Tahun	1	1
17.	Menghadiri acara rapat koordinasi penanggulangan banjir dan longsor	1	-

#### Sumber Olehan Data Tahun 2018

Dari data di atas bisa kita lihat kegiatan harian camat pangkalan lesung pada tahun 2017-2018 dalam melaksanakan pelayanan administrasi pada tahun 2017 sebanyak 211 kegiatan sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 192 kegiatan dan untuk rapat koordinasi ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2017 sebanyak 3 kegiatan sedangkan pada tahun 2018 camat tidak ada melakukan kegiatan .

Apabila diamati secara lebih mendalam, bahwa tugas umum yang dilaksanakan oleh camat belum berjalan dengan maksimal, hal ini dilihat dari fenomena yang penulis temukan dilapangan.

1. Koordinasi antara pihak camat dan pihak desa belum berjalan dengan baik, hal ini di buktikan dengan tidak adanya intruksi camat kepada masing-masing kepala desa untuk mengadakan ronda malam setiap desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Lesung, hal ini bisa dilihat dari tabel I.2 meningkatnya

kasus pencurian dan perampokan yang terjadi di desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Lesung.

2. Kurangnya koordinasi yang di lakukan antara camat dengan pihak kepolisian dalam membrantas perjudian di Kecamatan Pangkalan Lesung hal ini dapat dilihat dari tabel I. 3 tentang kegiatan camat dimana pada tahun 2018 camat tidak ada melakukan pertemuan resmi dengan pihak kepolisian dalam membahas maraknya perjudian yang ada di kecamatan pangkalan lesung.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul “**Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan**”.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berawal dari latar belakang diatas serta fenomena/gejala yang jelas di urai, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah dalam pelaksanaan tugas camat secara maksimal dalam memimpin dan mengarahkan masyarakat kepada ketentuan-ketentuan yang telah dilihat, bahwa camat sangat berperan penting bagi masyarakat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul “**Bagaimana Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman**

dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan?”

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

#### 2. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan menambah sumber pustaka yang telah ada.
- b. Bagi para akademis penelitian ini sebagai pengetahuan dan informasi guna menciptakan kemampuan pemahaman mengenai badan pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan.
- c. Dapat menjadi bahan referensi dan juga dapat menjadi subangan pemikiran bagi peneliti lainnya dimasa yang akan datan

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman dan acuan berfikir penulis dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan memaparkan khususnya teori tentang Analisis, Ilmu Pemerintahan, Pelaksanaan, Tugas, Kecamatan, Koordinasi, Ketentraman dan Ketertiban.

##### 1. Analisis

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Petter Salim dan Yeni Salim (2002) menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
- b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.
- d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).

- e. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.

## 2. Konsep Pemerintahan

Kemudian menurut Ndraha (2011;3) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintah (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Secara umum tugas pokok pemerintah menurut Rasyid (2002;14) antara lain adalah:

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak menjadi pembontakan didalam yang dapat menggulingkan yang sah melalui cara-cara kekerasan;
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;
- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka;
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah;

- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. Menerapkan kenijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Karena dalam menjalankan pemerintahan itu perlu ilmu bagaimana menjalankannya maka ilmu pemerintahan dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Menurut Brasz (dalam Syafi'i, 2011;21) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang carabagaimana lembaga/dinas pemerintah umum itu difungsikan dengan baik.

Pemerintah dalam bahasa inggris disebut Goverment yang berasal dari bahasa latin gubernate, greek gibernen yang berarti menggemudikan atau mengendalikan. Ilmu Pemerintahan adalah merupakan suatu proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat di sebut pemerintah. (Ndraha,2003;6).

Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan fungsi menjalankan Undang – Undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, menggderakkan dan mengarahkan segenap upaya masyarakat atau penduduk suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang telah di tetapkan.

Ilmu pemerintahan adalah orang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses layanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan

pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat di perlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan ) yang di perintah, penanggung dampak negatif pembangunan.

Budiarjo (2003;21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk suatu negara memiliki tujuan untuk membentuk negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut.

Menurut Ndraha( dalam Azam awang : 6) Pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap organ yang melakukan hubungan ilmu pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerima nya pada saat di perlukan, sesuai dengan tuntutan ( harapan) yang di perintah.

### **3. Konsep Pelaksanaan**

Menurut Syaukani (2002;295) mengemukakan bahwa implementasi atau pelaksanaan ialah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka mengantarkan kebijaksanaan kepada masyarakat sehingga kebijaksanaan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup pertama, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja penetapan siapa saja yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan secara konkret ke masyarakat.

Lilik Ekawati (2005; 42) mengatakan bahwa implementasi adalah tindakan oleh individu atau kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam urusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini meliputi usaha mentransformasikan keputusan dalam tindakan operasional, berusaha mencapai perubahan besar dan kecil sebagaimana diamanatkan oleh keputusan kebijaksanaan.

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus berjalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Selain itu perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan berhasil tidaknya proses implementasi.

#### **4. Konsep Tugas**

Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Stone dalam Moekijat (1998; 10) mengemukakan bahwa " *A task is spesific work activity carried out to archive a spesific purpose*" (suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu).

Sementara menurut Dale Yoder dalam Moekijat (1998; 9) mengemukakan bahwa " *The tern task is frequently used to describe one portion or element in a job*" (Tugas digunakan untuk mengembangkan suatu bagian atau suatu unsur dalam suatu jabatan).

Defenisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John dan Marry Miner dalam Moekijat (1998; 10), menyatakan bahwa “ Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”.

Sedangkan menurut Moekijat (1998; 11) mengemukakan bahwa tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari satu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

Menurut moenir (2010: 18) tugas di gunakan untuk mengembangkan suatu bagian atau suatu unsur dalam suatu jabatan, suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang di lakukan untuk mencapai suat tujuan tertentu.

## **5. Konsep Camat**

Camat merupakan perangkat daerah yang mempunyai kekhususan dibandingkan perangkat daerah lainya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan azas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosial kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik , ekonomi dan budaya mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam rangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama Camat selain memberikan pelayan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Dengan demikian, peran camat dalam pelaksanaan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan, atas dasar pertimbangan demikian, maka camat secara filosofis pemerintahan di pandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari Bupati atau walikota di wilayah kerjanya.

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 209 di jelaskan bahwa “kecamatan adalah perangkat Daerah kabupaten/kota. Jadi, kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, camat sebagai pimpinan tertinggi di kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan dikecamatan, kemudian juga camat harus memberikan pelayanan publik dikecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa/kecamatan

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan pasal 15 menerangkan tugas-tugas umum yang di selenggarakan oleh camat, meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Dengan begitu kompleksnya tuntutan tugas yang dibebankan pada camat tersebut, maka seorang pemimpin harus dapat menjalankan fungsi kepemimpinan dengan sebaik-baiknya dalam mengerakan bawahannya agar dapat memahami setiap uraian tugas yang diberikan kepadanya agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

## 6. Teori Koordinasi

Kata koordinasi dalam bahasa inggris yaitu *coordination* yang berasal dari kata co- dan oedinare yang berarti to regule dilihat dari pendekatan empirik, dikaitkan dengan segi etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order , not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama hal tertentu sehingga disatu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lain, sementara disisi lain yang satu langsung dan tidak langsung mendukung pihak yang lain. (Dalam Ndraha,2003;290)

Penggunaan istilah koordinasi sering di pertukaran atau di lakukan secara bergantian dengan istilah kerja sama (*Cooperation*), padahal koordinasi lebih dari sekedar kerja sama karena dalam koordinasi juga terkandung sinkronisasi.

Sementara kerja sama merupakan suatu kegiatan kolektif dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian kerja sama dapat terjadi tanpa koordinasi, sedangkan dalam koordinasi pasti ada upaya untuk menciptakan kerja sama.

Menurut Stoner (1986;318) koordinasi adalah proses pencapaian tujuan dan kegiatan unit-unit yang terpisah (dapertemen atau bidang-bidang fungsional) dalam suatu perusahaan organisasi pada umumnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien tanpa koordinasi orang-orang atau dapertemen akan kehilangan pandangan tentang peranan mereka dalam organisasi. Dan jika demikian halnya, maka mereka mungkin akan mulai mengejar kepentingan mereka sendiri yang akan mengorbankan tujuan organisasi secara keseluruhan.

Sedangkan menurut Ndaraha (2003;291) koordinasi dapat diartikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga pada satu sisi semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan pada sisi lain keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan lainnya.

Pelaksanaan koordinasi dalam suatu organisasi merupakan tugas dari pimpinan organisasi, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Farlan (dalam Handyaningrat, 1991;89) bahwa koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara para bawahannya dan menjamin kesatuan didalam pencapaian tujuan bersama.

Hasibuan (2006;85) berpendapat bahwa ;”koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan,dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”.

Sedangkan menurut Moekijat (dalam Zulkifli, 2005;161 ), koordinasi adalah sinkronisasi (penyelarasan) dari pada kegiatan – kegiatan secara teratur guna memberikan jumlah, waktu dan pengarahannya pelaksanaan yang selaras (harmonis) dan disatukan untuk tujuan tertentu.

Dan menurut Zulkifli (2005;161) menjelaskan bahwa koordinasi sebagai salah satu dari fungsi manajemen dapat di definisikan sebagai suatu proses pelaksanaan sejumlah pendekatan dalam rangka menyamakan persepsi dan tindakan sebagian dari atau seluruh personil terhadap permasalahan yang ada serta pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan kutipan diatas, dapat dilihat suatu gambaran bahwa koordinasi adalah suatu kegiatan untuk menyatu padukan dan menyelaraskan berbagai pihak yang terkait dalam suatu kegiatan, sehingga nantinya terdapat kesamaan sikap, pandangan maupun tindakan yang di lakukan dalam aktivitas pencapaian tertentu.

Menurut Ferlie ( dalam Nurcholis 2007 : 271) agar koordinasi bisa berjalan dengan baik maka perlu :

- a. Adanya kesesuaian antara kebijakan dasar dan keputusan pelaksanaannya.
- b. Adanya perlakuan yang sama terhadap semua aktor yang terlibat.

- c. Adanya perilaku yang konsisten antara para pejabat dalam menyalenggarakan tugas sesuai dengan deskripsi tugas masing-masing.
- d. Adanya tindakan pejabat yang taat asa terhadap prosedur dan batas waktu yang telah di tentukan.
- e. Adanya kejelasan kebijakan itu sendiri dan cara melaksanakannya

Menurut( Wijaja :1992) untuk melengkapi pengertian koordinasi perlu diperhatikan adanya jenis-jenis koordinasi:

- a. Koordinasi fungsional, antara dua atau lebih instansi yang mempunyai program yang berkaitan erat.
- b. Koordinasi instansional, terhadap beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu yang bersangkutan.
- c. Koordinasi teritorial, terhadap dua atau lebih wilayah dengan program tertentu.

Dalam melaksanakan jenis-jenis koordinasi tersebut di atas perlu memperhatikan masalah waktu yang menyinkronkan kegiatan secara serentak bersamaan atau berurutan. Pada hakikatnya dalam mencapai suatu tujuan yang berdayaguna dan berhasilguna dari kegiatan pemerintahan di daerah, perlu adanya keselarasan dan keserasian antara pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan kebutuhan daerah masyarakat, oleh sebab itu suatu bagian kegiatan atau beberapa bagian kegiatan di daerah yang dilaksanakan oleh instansi vertikal atau dinas daerah tidak semuanya tetapi pelaksaan kegiatan-kegiatan tersebut perlu dikaitkan

dengan kebutuhan daerah dan masyarakat di samping faktor teknis yang timbul sebagai akibat dari kegiatan itu sendiri.

**a. Manfaat Koordinasi**

Koordinasi sangat perlu dilakukan, terutama untuk menyatukan kesamaan pandangan antara berbagai pihak yang berkepentingan dengan kegiatan dan tujuan bersama. Manfaat koordinasi antara lain, untuk melakukan gerak sentripental, yaitu gerakan untuk mengembalikan kegiatan-kegiatan yang terpisah-pisah dalam kesatuan induknya. Hal ini penting karena pengelompokan tugas-tugas dalam lembaga kedalam unit-unit, biro-biro, bagian, direktorat, seksi-seksi, dan lain-lain yang dapat menimbulkan suatu kekuatan yang memisahkan diri dari kekuatan induknya (gerak sentrifugal).

Dalam hal ini, tiap unit cenderung hanya memberikan perhatian yang besar terhadap unit masing-masing. Untuk itu perlu ada kegiatan lain yang dapat mengembalikan gerak memisahkan diri itu supaya bisa kembali ke induknya (gerak sentripental). Dengan demikian, bahaya spesialis yang terlalu jauh kedalam lembaga sebagaimana jeruji-jeruji besi yang tegak dengan ujungnya dan tidak akan pernah bertemu, dapat di pertemukan melalui koordinasi.

Tanpa koordinasi, spesialisasi dan pembagian kerja yang di lakukan pada setiap usaha kerja sama akan sia-sia, karena setiap pembagian cenderung hanya memikirkan pekerjaan atau tugas masing-masing dan melupakan tujuan lembaga secara keseluruhan.

Koordinasi diperlukan untuk menghubungkan bagian yang satu dengan bagian yang lain sehingga tercipta suatu kegiatan yang terpadu mengarah pada

tujuan umum lembaga sebagaimana jari-jari kerangka payung. Melalui koordinasi setiap bagian menjalankan fungsi dengan spesialis tertentu dapat disatu padukan dan dihubungkan satu sama lain sehingga dapat menjalankan perannya secara selaras dalam mewujudkan tujuan bersama. Koordinasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan bersama.

#### **b. Macam-Macam Koordinasi**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja, koordinasi harus dilakukan semua tingkatan., baik di pusat maupun di daerah, bahkan dalam kesatuan-kesatuan administrasi, seperti bidang, seksi, bagian, sampai pada kesatuan-kesatuan yang paling kecil.

Secara teoritis dapat dikemukakan beberapa macam koordinasi sesuai dengan ruang lingkup dan arah kegiatannya. Berdasarkan ruang lingkungannya dapat diidentifikasi kedalam koordinasi intern dan ekstern. Koordinasi intern adalah koordinasi antara pejabat atau unit dalam satu lembaga, sedangkan koordinasi ekstern adalah koordinasi antara pejabat dari berbagai lembaga atau antar lembaga.

Berdasarkan arah kegiatannya, dapat diidentifikasi adanya koordinasi vertikal, horizontal, fungsional dan diagonal. Koordinasi vertikal terjadi antara para pejabat dengan bagian-bagian, sub-sub bagian dan berbagai staf lembaga yang ada di bawahnya. Koordinasi horizontal yaitu koordinasi yang terjadi antara pejabat yang memiliki tingkat hirarki yang sama dalam satu lembaga, dan antar pejabat dari berbagai lembaga yang sederajat atau satu level. Koordinasi fungsional adalah koordinasi yang terjadi antar pejabat, antar unit atau antar lembaga, atas

dasar kesamaan fungsi dalam kepentingan. Koordinasi diagonal adalah koordinasi antar pejabat antar unit yang memiliki perbedaan ,baik dalam fungsi maupun tingkat hirarki.

Menurut Siagian (dalam Mulyasa, 2002; 137 ) mengelompokan koordinasi sebagai berikut:

- a. Koordinasi yang terjadi antara atasan dan bawahan yang di sebut koordinasi vertikal
- b. Koordinasi diantara sesama pejabat yang singkat dalam instansi di sebut koordinasi horizontal.
- c. Koordinasi fungsional, koordinasi antar intansi, tiap-tiap instansi mempunyai tugas dan fungsi dalam suatu bidang tertentu. Dengan begitu setiap intansi berkewajiban untuk mengkoordinasikan kegiatannya dengan intansi lain yang mempunyai hubungan fungsional dengannya, sehingga akan terwujud sesuatu yaitu sistem dari berbagai komponen itu bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh.

Dengan memandang koordinasi melalui proses manajemen yang perlu di ukur adalah:

1. Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi.
2. Kesadaran pentingnya koordinasi,berkoordinasi,koordinasi built-in di dalam setiap job atau task.
3. Kompetisi partisipan, kalender pemerintahan, peserta forum koordinasi harus pejabat yang berkompeten mengambil keputusan. Untuk menjamin kehadiran

pejabat yang demikian, harus ditetapkan kalender pemerintah (koordinasi) yang ditaati sepenuhnya dari atas kebawah.

4. Kesepakatan dan komitmen, kesepakatan dan komitmen harus diagendakan (diprogramkan) oleh setiap pihak secara institusional (formal)
5. Penetapan kesepakatan oleh setiap pihak yang berkoordinasi.
6. Insentif koordinasi, yaitu sanksi bagi pihak yang ingkar atau tidak mentaati kesepakatan bersama, sanksi itu datang dari pihak atasan yang terkait.
7. Feedback sebagai masukan ke dalam proses koordinasi selanjutnya.

#### **c. Cara Melakukan Koordinasi**

Koordinasi dapat dilakukan secara formal maupun informal, melalui konferensi lengkap, pertemuan berkala, pembentukan panitia gabungan, pembentukan badan koordinasi staf, wawancara dengan bawahan, memorandum berantai, buku pedoman lembaga, tata kerja, dan sebagainya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sutarto (dalam Mulyasa 2002; 137) yang mengemukakan cara-cara koordinasi sebagai berikut :

1. Mengadakan pertemuan informal diantara pejabat.
2. Mengadakan pertemuan formal diantara para pejabat.
3. Membuat edaran berantai kepada pejabat yang diperlukan.
4. Membuat penyebaran kartu kepada para pejabat yang diperlukan.
5. Mengangkat koordinator.
6. Membuat buku pedoman lembaga, buku pedoman tata kerja, dan buku pedoman kumpulan peraturan.
7. Berhubungan dengan alat penghubung (telepon)

8. Membuat tanda-tanda
9. Membuat simbol.
10. Membuat kode.
11. Bernyanyi bersama.

Pada hakikatnya, koordinasi dapat dilakukan secara formal dan informal. Koordinasi formal diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya impersonal, seperti dalam kehidupan birokrasi, membuat peraturan atau pedoman, mengangkat pejabat atau panitia bersama dan dokumen resmi lainnya. Sementara cara-cara informal dapat dilakukan dengan pembicaraan dan konsultasi pada saat bertemu di luar kepentingan dinas.

Menurut Manullang (2008;72) mengemukakan bahwa koordinasi yang baik dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Mengadakan pertemuan resmi.

Mengadakan pertemuan resmi antara unsur-unsur atau unit-unit yang harus di koordinasikan. Dalam pertemuan seperti ini, dibahas dan diadakan pertukaran pikiran dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan mereka akan berjalan seiring dan bergandengan dalam mencapai suatu tujuan.

2. Mengangkat suatu tim.

Mengangkat seseorang, suatu tim atau panitia koordinator yang khusus bertugas melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi seperti memberi penjelasan atau bimbingan kepada masing-masing unit yang di koordinasikannya.

3. Membuat buku pedoman.

Membuat buku pedoman yang berisi penjelasan tugas masing-masing unit. Buku pedoman seperti itu di berikan kepada setiap unit untuk di pedomani dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

4. Mengadakan pertemuan informal.

Pimpinan atau atasan mengadakan pertemuan informal dengan bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi dan pengarahan.

Melakukan kegiatan koordinasi dengan berbagai cara seperti tersebut diatas adalah amat perlu sebab adanya kegiatan koordinasi dapat menghuindarkan konflik, mengurangi duplikasi tugas, meniadakan pengangguran, melenyapkan kepentingan unit sendiri dan memperkuat kerja sama. Dengan koordinasi diharapkan kerja sama kesatuan tindakan dan kesatuan tujuan.

Menurut Stoner (1986;318) koordinasi adalah proses pencapaian tujuan dan kegiatan unit-unit yang terpisah (dapertemen atau bidang-bidang fungsional dalam suatu perusahaan organisasi secara efesien tanpa koordinasi orang-orang atau dapertemen akan kehilangan pandangan tentang peranan mereka sendiri, yang akan mengorbankan tujuan organisasi secara keseluruhan.

Selanjutnya menurut Suganda (1998;12) mentyebutkan bahwa koordinasi adalah menyatu padukan gerakan pencapaian dengan efesien.

## 7. Ketentraman

Ketentraman berasal dari kata tentram dalam kamus bahasa Indonesia (KBBI) tentram diartikan sebagai kondisi yang aman, tenang, sejahtera, dan makmur. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa ketentraman mengarahkan kepada bagaimana pemerintahan mampu untuk memberikan dan membentuk rasa aman bagi masyarakatnya sehingga akan menimbulkan suasana yang tenang dalam setiap kegiatan dan aktivitas yang dilakukan masyarakat yang akhirnya wujud dari kesejahteraan dan kemakmuran akan dapat terwujud. (Yasin, 1995:222)

Dengan tingkat ketentraman dan ketertiban yang tinggi desa akan mampu mencegah dan menangkal atau mengatasi segala gangguan keamanan dan sebaliknya jika desa tidak aman dan tertib maka proses pembangunan di desa akan terhambat dan masyarakat yang tinggal di desa tersebut akan selalu merasa cemas bahkan ketakutan.

Ketentraman dan ketertiban adalah dua keadaan yang sangat dirasakan bersama dalam situasi waktu. Ketentraman sebagai satu keadaan akibat dari pada adanya ketertiban tanpa adanya terlebih dahulu ketertiban orang akan sia-sia mengharapkan adanya keamanan. Apabila ketertiban telah berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan maka dengan sendirinya akan dirasakan adanya ketentraman. Demikian bahwa sesungguhnya ketentraman adalah akibat dari telah terlaksananya ketertiban dengan baik. Bisa dikatakan dimana adanya ketertiban disana ada ketentraman. Madjloses ( dalam Rauf;2004;6-7).

Istilah ketentraman dan ketertiban kadang-kadang disebut keamanan dan ketertiban karena keamanan dan ketertiban tidak mungkin diperoleh tanpa pemeliharaan keamanan .Irawan Soejito (dalam Rauf;1990;69).

## 8. Ketertiban

Ketertiban menurut salah satu syarat utama dalam mensukseskan pembangunan ketertiban menurut Madjloes(dalam Rauf;2005;6). Adalah sebagai suatu asas tata kehidupan dan hasil dari ketentuan-ketentuan baik secara tertulis yang di sepakati dan dilaksanakan bersama.

Kemudian ketertiban merupakan kata dasar dari tertib dimana didalam kamus bahasa indonesia tertib diartikan sebagai kondisi yang teratur dan rapi atau kondisi adanya peraturan yang baik. Jika kita artikan secara luas dan mengacu kepada fungsi pemerintahan maka ketertiban disini dapat kita terjemahkan sebagai upaya yang harus dilakukan pemerintah agar terbentuknya kondisi yang teratur dan rapih ditengah-tengah masyarakat melalui penerapan sebagai peraturan dan program-program pemerintahan dengan baik.(Yasin;1995;223).

Dalam menjalankan tugasnya pemerintah kecamatan beserta jajarannya melaksanakan ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan wilayahnya masing-masing, tujuan utama di bentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dan menciptakan ketentraman dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya dengan wajar.

Ciri-ciri pokok ketertiban Soekanto (2012:78)

- a. Dapat di proyeksi sebelumnya.
- b. Kerjasama

- c. Pengendalian terhadap kekerasan
- d. Konsistensi
- e. Tahan lama
- f. Stabilitas
- g. Hirarki
- h. Komformitas
- i. Tidak adanya konflik
- j. Uniformitas dan keseragaman
- k. Gotong royong
- l. Didasarkan pada kepatuhan
- m. Berpegangan pada tahap yang telah di tentukan
- n. Sesuai pola
- o. Tersusun

Ketertiban saling berkaitan dengan ketentraman, ketertiban dan ketentraman adalah dua keadaan yang dapat dirasakan bersama (serentak) dalam suatu waktu. Ketentraman sebagai suatu keadaan adalah akibat dari pada adanya ketertiban, tanpa adanya terlebih dahulu ketertiban orang akan sia-sia mengharapkan adanya ketentraman. Apabila ketertiban telah berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan, maka dengan sendirinya akan dirasakan adanya ketentraman. Demikianlah bahwa sesungguhnya ketentraman adalah akibat dari terlaksananya ketertiban dengan baik, dimana ketertiban di situ ada ketentraman.

Kondisi tentram dan tertib masyarakat tidak akan tercapai apabila tidak adanya keamanan, seperti yang dinyatakan Soejito ( dalam Rauf,2005;69) bahwa

istilah ketentraman dan ketertiban tidak akan mungkin di peroleh tanpa pemeliharaan keamanan.

Menurut Abdussalam (2007;104) keamanan adalah perlindungan dari segala kekerasan-kekerasan / kekejaman-kekejaman terhadap seseorang termasuk tindakan-tindakan mencela fisik atau psikologi maupun serangan yang bersifat memfitnah pada moral seseorang.

Menurut Soekanto ( 2001:79) bahwa keadaan tidak tentram memungkinkan terjadi, apabila masyarakat secara pribadi mengalami:

- a. Kekecewaan
- b. Konflik
- c. Kekhawatiran

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa kondisi ketentraman dan ketertiban akan terkait dengan masalah keamanan. Sehingga tanpa keamanan tidak akan tercipta ketentraman dan ketertiban, sedangkan

ketentraman dan ketertiban merupakan dua keadaan yang dapat dirasakan secara bersama ( serentak). Menurut Madjloes ( dalam Syahyahrudin, skripsi ilmu pemerintahan, 2009;26) ketentraman dan ketertiban adalah dua keadaan yang sangat dirasakan bersama dalam situasi waktu. Ketentraman sebagai suatu keadaan akibat dari pada adanya ketertiban, tanpa adanya terlebih dahulu ketertiban orang akan sia-sia mengharapkan adanya keamanan. Apabila ketertiban telah berjalan dengan baik sebagaimana di harapkan maka dengan sendirinya akan dirasakan adanya ketentraman. Demikianlah bahwa sesungguhnya ketentraman adalah akibat dari terlaksananya ketertiban dengan baik. Bisa dikatakan dimana ketertiban disana ada ketentraman.

Kondisi ketentraman dan tertib bagi masyarakat tidak akan tercapai apabila tidak adanya keamanan, seperti yang di nyatakan oleh Seojito ( dalam Usman,Skripsi ilmu Pemerintahan, 2011;31) bahwa istilah ketentraman dan ketertiban kadang-kadang disebut keamanan dan ketertiban karena ketentraman dan ketertiban tidak akan mungkin diperoleh tanpa pemeliharaan keamanan.

### 9. Penelitian Terdahulu

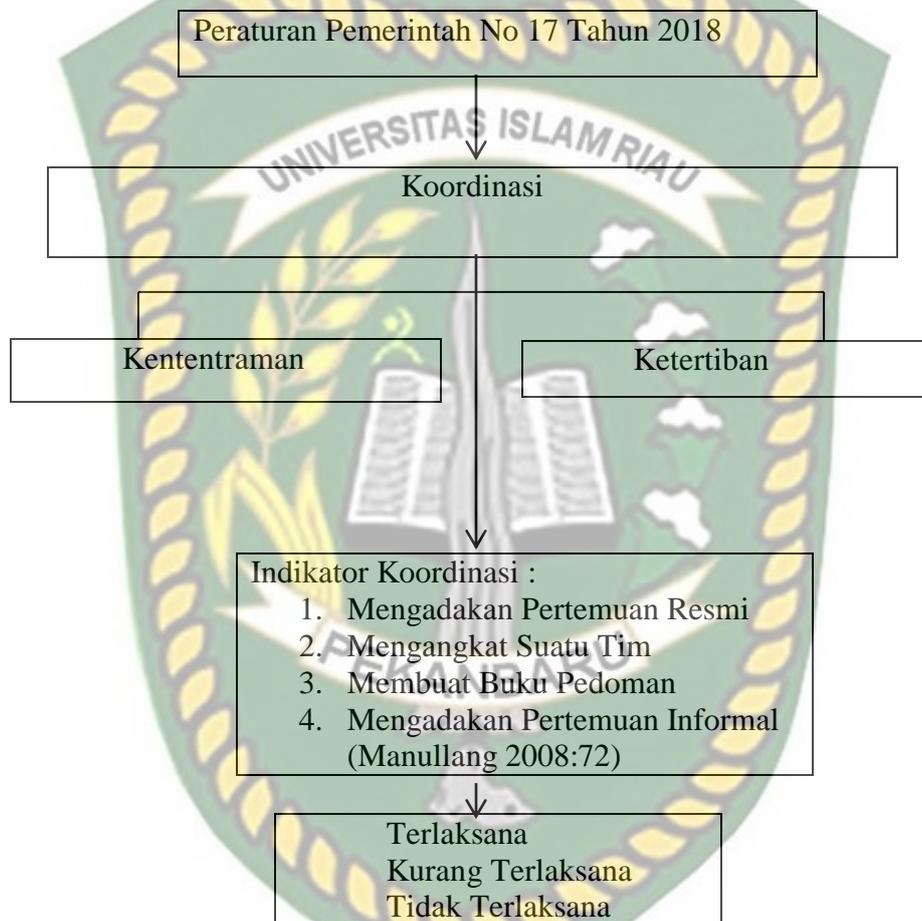
	Nama	Judul	Teori	Indikator	Perbedaan	Persamaan
1	Iskandar 1073104 93	Pelaksanaan tugas camat mengkoordinasi ketentraman dan ketertiban (studi dikecamatan bangko pusaka kabupaten rokan hilir)	Farland dalam handaya ningrat	1. ilmu pemerintahan 2. pelaksanaan 3. tugas 4. ketentraman dan ketertiban	1,Lokasi penelitian berbeda lokasi penelitian penulis di kecamatan pangkalan lesung kabupaten pelalawan  2, teori berbeda penulis menggunakan teori koordinasi (manullang)  3, indikator berbeda penulis menggunakan 4 indikator mengadakan pertemuan, mengangkat suatu tim, membuat buku pedoman, mengadakan pertemuan informal	Tidak adanya persamaan teori mau model indikator dan lokasi penelitian yang penulis gunakan dengan penelitian terdahulu ini
2	Melisa septiani	Peranan camat sebagai	Ndraha, taliziduhu	1. perencanaan 2. pembagian	1,Lokasi penelitian	tidak terdapat persamaan

	andriani 0973106 93	koordinator bidang ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan reteh kabupaten indragiri hilir	(2003:53)	kerja 3. komunikasi 4. pertemuan	berbeda lokasi penelitian penulis di kecamatan pangkalan lesung kabupaten pelalawan  2, teori berbeda penulis menggunakan teori koordinasi (manullang)  3, indikator berbeda penulis menggunakan 4 indikator mengadakan pertemuan, mengangkat suatu tim, membuat buku pedoman, mengadakan pertemuan informal	model teori maupun model sub indikator dan lokasi penelitian yang penulis gunakan
3	Ratna Ramanta Asari 1273102 32	Analisis pelaksanaan tugas Camat dalam mengkoordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan kandis kabupaten siak	Manullang (2007:75)	1. mengadakan pertemuan resmi 2. mengangkat suatu tim 3. membuat buku pedoman 4. mengadakan pertemuan informasi	1, lokasi penelitian berbeda penelitian penulis di kecamatan pangkalan lesung kabupaten pelalawan	Terdapat persamaan dengan model teori manullang dan ada persamaan dalam model indikator menurut manullang (2007:75)

No	1	2	3	4	5	6
4	Nurfauzi	Peranan camat sebagai koordinator penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir	Sukanto (2001:269)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan</li> <li>2. Pengorganisasian</li> <li>3. Menggerakan</li> <li>4. Pengawasan</li> <li>5. Komunikasi</li> </ol>	<p>1, Lokasi penelitian berbeda lokasi penelitian penulis di kecamatan pangkalan lesung kabupaten pelalawan</p> <p>2, teori berbeda penulis menggunakan teori koordinasi (manullang)</p> <p>3, indikator berbeda penulis menggunakan</p> <p>4 indikator mengadakan pertemuan, mengangkat suatu tim, membuat buku pedoman, mengadakan pertemuan informal</p>	tidak terdapat persamaan model teori maupun model sub indikator dan lokasi penelitian yang penulis gunakan

## 10. Kerangka pikir

**Gambar II.1 : Kerangka pikir dari penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.**



**Sumber : Modifikasi Penelitian 2018**

### B Konsep Operasional

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan ini, maka dengan ini diberikan konsep operasional sebagai berikut:

1. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

2. Camat adalah pemimpin formal yang menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab kepada Bupati/Walikota
3. Ketentraman adalah kondisi yang aman, tentang, sejahtera dan makmur.
4. Ketertiban adalah kondisi yang teratur, rapi atau kondisi adanya pelaksanaan peraturan yang baik.
5. Koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan, dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi (Manullang 2007;72)
6. Mengadakan pertemuan resmi juga dapat diartikan antar unit-unit yang harus dikoordinasikan. Dalam pertemuan seperti ini diadakan pertukaran pikiran antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan mereka akan sering dan beriringan dalam mencapai tujuan.
7. Mengangkat suatu tim merupakan mengangkat seseorang, suatu tim atau panitia koordinator yang khusus bertugas melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi seperti memberikan penjelasan atau bimbingan kepada setiap unit-unit yang di koordinasikannya.
8. Membuat buku pedoman adalah buku yang berisi penjelasan tugas dari masing-masing unit, Buku pedoman seperti itu di berikan kepada setiap unit untuk di pedomani dalam melaksanakan tugas masing-masing.

9. Mengadakan pertemuan informal ialah pimpinan atau atasan mengadakan pertemuan informal dengan bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi dan pengarahan.

#### D. Operasional Variabel

Adapun penjelasan yang dilakukan dalam penelitian ini dituangkan pada operasional variable yang dilihat dari konsep yang meliputi definisi implementasi. Sementara untuk indikator dan item penilaian di masukkan dalam konsep operasional variable dengan ukuran hasil penelitian sebagai berikut

**Tabel II.2 : Konsep Operasional Variable Penelitian Tentang Analisa Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.**

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Item Penilaian 4	Ukuran 5	
Koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan	Koordinasi	a. Mengadakan pertemuan resmi	1. Mengadakan musyawarah	Terlaksana	
		b. Mengangkat suatu tim	2. Adanya kerja sama	Kurang terlaksana	
			3. Adanya pertemuan	Tidak terlaksana	
			1. Membentuk suatu tim	Terlaksana	
		c. Membawa buku pedoman	2. Melaksanakan prosedur	Kurang terlaksana	
			3. Memberikan rincian tugas	Tidak terlaksana	
				1. Adanya penjelasan tugas	Terlaksana

1	2	3	4	5
organisasi secara keseluruhan (Manulang 2007:75)		d. Mengadakan pertemuan informal	2. Adanya tujuan yang ingin dicapai 3. Adanya bimbingan  1. Membuat jadwal 2. Melakukan Konsultasi 3. Memberikan pengarahan	Kurang terlaksana  Tidak terlaksana  Terlaksana  Kurang Terlaksana  Tidak Terlaksana

Sumber: Modifikasi Peneliti Tahun 2018

#### E. Teknik pengukuran

Setelah di temukan konsep-konsep yang bersangkutan dengan penelitian ini, maka penulis menetapkan teknik pengukuran Variable dan Indikator Variable Koordinasi, maka teknik tersebut adalah sebagai berikut :

Terlaksana : Apabila semua kriteria indikator koordinasi terlaksana dengan ukuran 65% - 100 % dari jawaban responden.

Kurang Terlaksana : Apabila semua kriteria indikator terlaksana dengan ukuran 34% - 66% dari jawaban responden.

Tidak Terlaksana : apabila semua kriteria indikator dengan ukuran <345 dari jawaban responden.

Adapun kategori pengukuran setiap indikator koordinasi, berikut ini teknik pengukurannya sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan Resmi dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua sub indikator variable terlaksan dengan ukuran 65% - 100% dari jawaban responden.

Kurang Terlaksana :Apabila semua sub indikator variable terlaksana dengan ukuran 34% - 66% dari jawaban responden.

Tidak Terlaksana :Apabila semua sub indikator variable terlaksana dengan ukuran <34% dari jawaban responden.

2. Mengangkat Suatu Tim di katakan:

Terlaksana :Apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran 65%-100% dari jawaban responden

Kurang terlaksana :Apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran 34%-66% dari jawaban responden

Tidak terlaksana :Apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran <34% dari jawaban responden

3. Membuat buku pedoman dikatakan:

Terlaksana :Apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran 65%-100% dari jawaban responden

Kurang terlaksana :Apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran 34%-66% dari jawaban responden

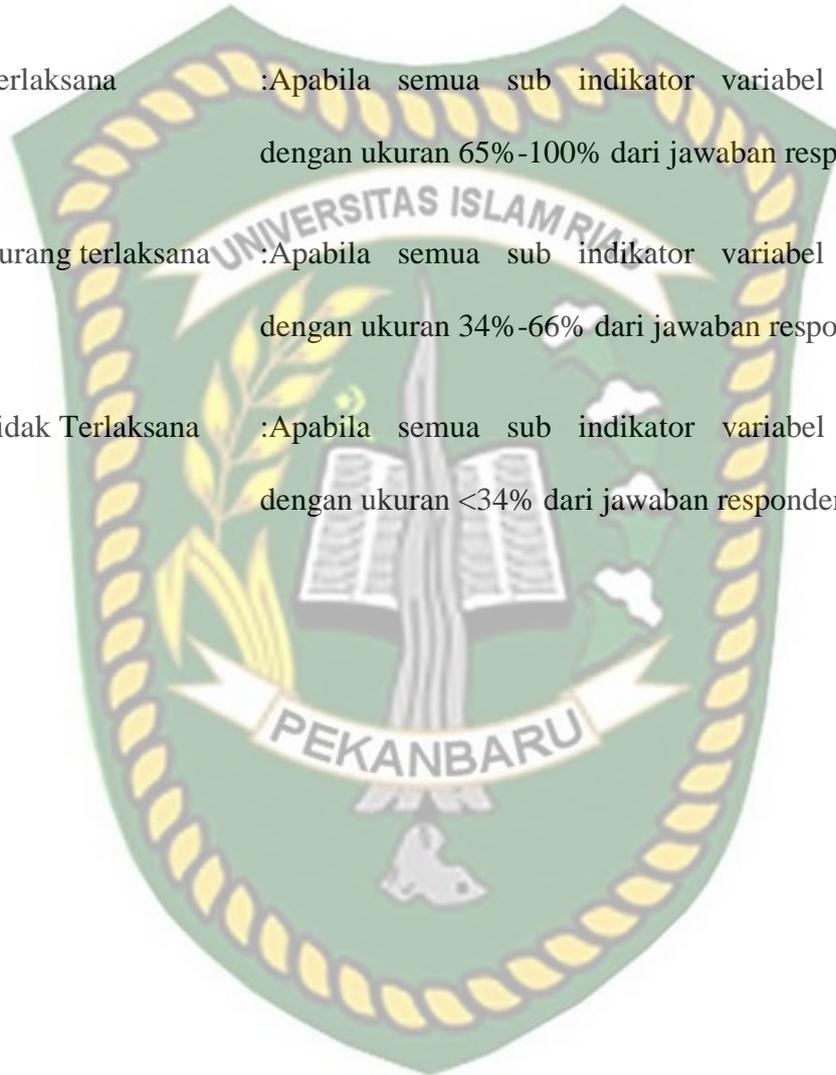
Tidak Terlaksana :Apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran <34% dari jawaban responden

4. Mengadakan Pertemuan Informal dikatakan:

Terlaksana :Apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran 65%-100% dari jawaban responden

Kurang terlaksana :Apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran 34%-66% dari jawaban responden

Tidak Terlaksana :Apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran <34% dari jawaban responden



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan data dan mengklarifikasinya sehingga dapat diperoleh sebuah analisa terhadap masalah-masalah yang dihadapi.

#### **B. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini di kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten pelalawan provinsi Riau adapun dasar pertimbangan penulis untuk mengambil dikecamatan ini menjadi lokasi penelitian dikarenakan terdapatnya permasalahan mengenai ketentraman serta perjudian sehingga penulis tertarik untuk mengkat penilitan di lokasi kecamatan Pangkalan Lesung

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum yang meliputi unsur pimpinan kecamatan pangkalan lesung, meliputi camat pangkalan lesung, Kapolsek Pangkalan Lesung, ,Masyarakat, serta Kepala Desa Mayang Sari, kepala desa dusun tua dan kepala desa pangkalan lesung yang ada di Kecamatan Pangkalan Lesung.

## 2. Sampel

Sampel adalah orang yang di ambil atau di jadikan sumber penelitian atau sampel penelitian untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian. Sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini penulis mengambil 3 Desa sebagai sampel dengan teknik purposive sampling karna berdasarkan pengamatan sementara didaerah tersebut masih sangat rawan dan sering terjadi permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum, Desa tersebut yaitu Desa Mayang Sari, Dusun Tua, Pangkalan Lesung untuk lebih jelas nya:

**Tabel III.1 Jumlah Populasi Dan Sampel Unsur Pimpinan Kecamatan Dan Aparatur Pemerintahan Dalam Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.**

No	Sub populasi	Populasi	Sampel	Presentase(%)
1.	Camat pangkalan lesung	1	1	100%
2.	Pegawai kantor camat	44	44	100 %
3.	Kapolsek pangkalan lesung	1	1	100 %
4.	Kepala desa	3	3	100 %
5.	Pangkalan Lesung (KK)	2.057	16	1,7%
6	Dusun Tua (KK)	359	15	4.5%
7	Mayang Sari (KK)	431	16	3.8%
	Jumlah	4.945	96	-

### D. Teknik Penarikan Sampel

Penelitian ini menggunakan dua teknik yaitu teknik *Sensus* dan teknik *Purposive Sampling* atau pengambilan sampel di pilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Untuk Kepala Camat , ,kepala Kapolsek, menggunakan

teknik *Sensus* . yaitu penarikan sampel secara keseluruhan dari semua populasi yang ada. Sedangkan untuk Masyarakat, 3 Kepala Desa dan Pengawai Kantor Camat Pangkalan Lesung di lakukan dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu penarikan dilakukan pada responden yang di anggap mengetahui masalah penelitian.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Premier adalah data yang diperoleh dengan cara penelitian langsung dilapangan yaitu dengan melakukan penyebaran kuisisioner dan wawancara bebas terpimpin secara langsung dengan responden penelitian guna mendapatkan tanggapan responden terhadap masalah penelitian ini, adapun data tersebut adalah berbentuk responden, mengadakan pertemuan resmi, mengangkat suatu tim, membawa buku pedoman, dan mengadakan pertemuan informal.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku seperti perundang-undangan serta literature yang berhubungan dengan evaluasi kebijakan. objek pada penelitian ini:
  - a. Keadaan geografis lokasi penelitian
  - b. Struktur organisasi Kecamatan Pangkalan Lesung.
  - c. Data Jumlah Permasalahan Ketentraman Dan Ketertiban
  - d. Dan data lainya yang berhubungan dengan penelitian.



## **F. Teknik Pengumpulan data**

### **1. Observasi**

Yaitu yang akan diadakan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat.observasi dilakukan padan Kecamatan Pangkalan Lesung sehingga dapat mengetahui permasalahan yang terjadi mengenai Ketentraman dan Ktertiban Umum di Kecamatan Pangkalan Lesung

### **2. Kuisisioner**

Teknik menyusun di ajukan guna memperoleh informasi data yang berkaitan dengan penelitian dan menanyakan pertanyaan yang telah dibuat untuk Kepala Desa , Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pangkalan Lesung, dan proses berlangsungnya penyebaran kuisisioner ini memakan waktu selama 5 hari untuk penyebaran kuisisioner khusus masyarakat peneliti mendatangi rumah-rumah responden yang menurut peneliti paham dengan masalah penelitian ini sedangkan penyebaran untuk pegawai kecamatan peneliti mendatangi kantor camat dan menyebarkan kuisisioner tersebut .

### **3. Wawancara**

Yaitu teknik pengumpulan data yang di lakukan melalui proses tanya jawab langsung atau berkomunikasi secara langsung kepada responden secara menyeluruh dan mendalam yang dianggap mengerti permasalahan dan menanyakan pertanyaan yang telah dibuat ke Camat dan Kepala Kepolisian Sektor Pangkalan Lesung dan data yang penulis dapat sebuah rekaman hasil wawancara penulis dengan Camat dan Kepala Kepolisian Sektor.

#### 4. Dokumentasi

Yaitu kumpulan data yang berbentuk nyata dan diperoleh berdasarkan sistem pengelolaan data yang di sebut proses dokumentasi. Tanpa adanya dokumentasi, data tersebut tidak akan menjadi sebuah dokumen yang baik atau nyata. data dokumentasi yang penulis ambil dalam penelitian ini berupa foto-foto saat penulis melakukan penelitian.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Untuk melakukan analisa data yang penulis peroleh baik data primer maupun data skunder, dalam hal ini dilakukan analisa secara kuantitatif dan berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi. Dalam hal ini penulis menggunakan kuisisioner untuk memperoleh tanggapan responden terdapat masalah yang di teliti dan wawancara dengan informasi., di mana nantinya data yang di peroleh hasil dari kuisisioner dan wawancara terlebih dahulu dikumpulkan, kemudian penulis kelompokkan menurut jenis dan kegunaan masing – masing dan keterangan – keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian, kemudian data tersebut di olah dan dianalisa sesuai dengan teori yang digunakan dan disajikan dalam bentuk uraian -uraian atau penjelasan-penjelasan terhadap masalah penelitian dan ditambahkan dengan uraian hasil observasi dilapangan yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.

**H. Jadwal hasil penelitian**

**Tabel III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																			
		Des 2018				Jan 2019				Feb 2019				Mar 2019				Apr 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Perbaikan UP																				
4	Riset																				
5	Pengurusan Rekomendasi Penelitian																				
6	Penelitian Lapangan																				
7	Pengelolaan Data																				
8	Penyusunan Laporan Penelitian																				
9	Konsultasi Kripsi																				
10	Ujian Skripsi																				
11	Revisi dan Pengesahan Skripsi																				
12	Pengadaan serta Penyerahan Skripsi																				

**Olahan Data Tahun 2018**

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

#### A Kabupaten Pelalawan

##### 1. Geografi

Kabupaten Pelalawan adalah salah satu Kabupaten yang ada di provinsi riau indonesia. Dengan mencakup luas lebih kurang 13.924,94 KM<sup>2</sup>, merupakan daerah yang terletak antara 00°46'24" lintang Utara 00°24'34"Lintang Selatan dan 101°30'37"Bujur Timur batas –batas daerah Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut

Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti

Barat : Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru

Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi dan Pasir Penyu , Indragiri Hilir

Timur : Kabupaten Karimun dan Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Pelalawan dibelah oleh aliran sungai kampar, serta pada kawasan ini menjadi pertemuan dari sungai Kampar Kanan dan sungai Kampar Kiri. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar yaitu Pulau Mendol, Pualau Serapung dan Pulau Muda serta Pulau-Pulau yang tergolong kecil seperti Pulau Tugau, Pulau Labuh, Pulau Baru Pulau Ketam dan Pulau Untut.

Struktur wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan daratan rendah dan bukit-bukit, dataran rendah membentang ke arah timur dengan luas wilayah mencapai 93% dari total keseluruhan. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi. Selain karakteristik tanahnya Kabupaten Pelalawan juga memiliki beberapa objek wisata yang sangat populer.

Selain dari sektor pariwisata perekonomian Kabupaten Pelalawan juga terdapat dari sektor industri kontribusi sektor industri di Kabupaten Pelalawan mencapai 51,41%. Dan Kabupaten Pelalawan juga memiliki sektor pertambangan, ada dua jenis sektor pertambangan yang ada di kabupaten pelalawan yaitu minyak bumi dan gas bumi. Secara Administrasi Kabupaten Pelalawan terbagi dalam 12 kecamatan.

## 2. Demografi

Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan, memiliki jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan 456,945 jiwa. Penduduk Pelalawan adalah orang melayu tersebar di sebagian kabupaten pelalawan, selanjutnya terdapat juga beberapa etnis jawa, batak, dan minang. Dan wtnis jawa termasuk banyak populasinya ketimbang etnis batak dan minang.

Salah satu kecamatan yang penduduknya merupakan berbagai etnis yaitu kecamatan Pangkalan Lesung dengan penduduk yang cukup luas masyarakat

kecamatan Pangkalan Lesung mengantungkan mata pencariannya di sektor pertanian dan perkebunan.

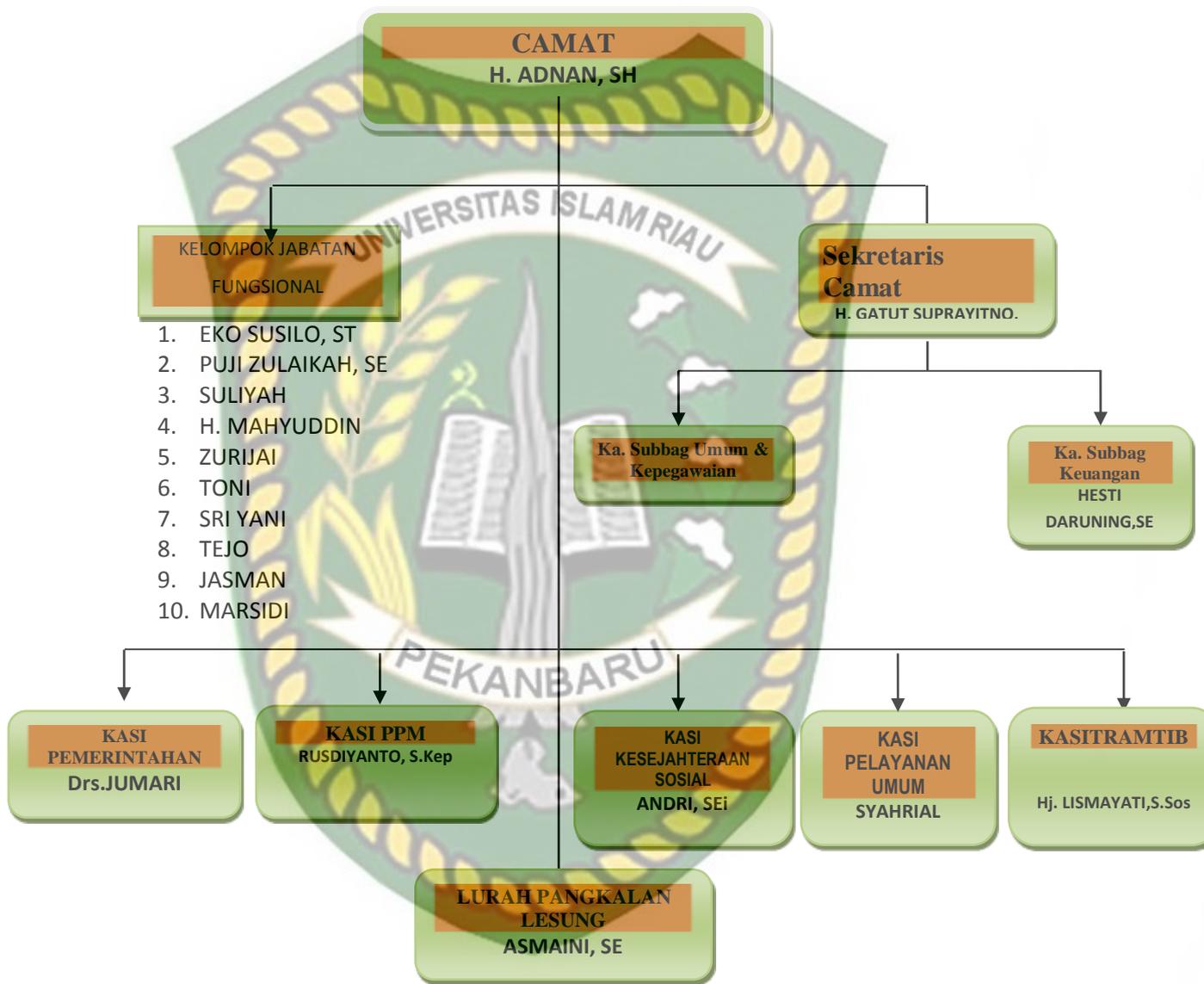
## **B. Gambar Umum Kecamatan Pangkalan Lesung**

Kecamatan Pangkalan Lesung merupakan Pemekaran dari Kecamatan Pangkalan Kuras di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Teluk Meranti. Peresmian Operasionalnya secara deponitif dilakukan pada tanggal 15 September 2001 dengan Ibu Kota Pangkalan Lesung.

Kecamatan Pangkalan Lesung memiliki luas wilayah 472,74 Km<sup>2</sup> yang saat ini dengan jumlah penduduk 26.659 jiwa yang terdiri dari 1 (satu) kelurahan, dan 9 (sembilan) desa , dengan batas-batas wilayah Sebagai Berikut :

- Utara berbatas dengan Kecamatan Bandar Petalangan
- Selatan berbatas dengan Kecamatan Ukui
- Timur berbatas dengan Kecamatan Kerumutan
- Barat berbatas dengan Kecamatan Ukui dan Pangkalan Kuras

**BAGAN ORGANISASI KECAMATAN PANGKALAN LESUNG  
KABUPATEN PELALAWAN**



**Gambar IV.2 Susunan Organisasi Kecamatan Pangkalan Lesung**

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A Identitas Responden

##### 1. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Secara teoritis faktor usia akan mempengaruhi seseorang dalam bekerja. Disisi lain tingkat usia juga akan mempengaruhi seseorang dalam setiap melakukan aktivitas kehidupannya, usia seseorang cenderung mempengaruhi pola pikir dalam bekerja, adapun tingkat usia responden dalam penelitian ini dapat dilihat dari table berikut :

**Tabel V.I Identitas Responden Berdasarkan Usia**

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	21-29	13	14 %
2.	30-39	23	24%
3.	40-49	21	23%
4.	≥50	37	39%
Jumlah		94	100%

**Sumber : Olahan Data Tahun 2018**

Berdasarkan table diatas V.1 dapat diketahui identitas responden berdasarkan umur adalah sebanyak dari 94 dijadikan responden sebanyak 13 orang (14%) berumur 20-29 tahun, sebanyak 23 orang (24%) berumur 30-39 tahun, sebanyak 21 orang (23%) berumur 40-49 tahun dan sebanyak 37 orang (39%) berumur diatas 50 tahun.

## 2. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Identitas responden pada tingkat pendidikan diperlakukan guna memberikan gambaran mengenai identitas responden yang akan menjawab maksud dari penelitian ini. Faktor pendidikan memegang peranan sangat penting bagi penulis dalam upaya memperoleh pengetahuan terhadap hasil jawaban yang diberikan responden. Karena menurut penulis orang yang berpendidikan umumnya akan lebih tinggi pengetahuannya dan lebih bijaksana membandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih rendah, walaupun hal ini tidak mutlak menjadi kebenaran

Karna begitu pentingnya pendidikan dalam mempengaruhi pikiran dan sikap seseorang, maka melalui data table berikut akan dapat diketahui gambaran dari tingkat pendidikan responden. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terlihat bahwa jenjang pendidikan responden terdiri dari pendidikan rendah sampai pada pendidikan tinggi, untuk mengetahui tingkat pendidikan responden dapat dilihat rincian datanya pada table berikut:

**Tabel V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan**

No	Tingkat	Jumlah	Persentase
1.	SD	4	4%
2.	SLTP	10	10%
3.	SMA /SMK	40	43%
4.	D II – D III	4	4%
5.	STRATA 1	36	39%
Jumlah		94	100%

**Sumber : Olahan Data Tahun 2018**

Berdasarkan table diats V.2 dapat diketahui identitas responden berdasarkan pendidikan adalah sebanyak dari 94 dijadikan responden sebanyak 4 orang (4%) berpendidikan SD, sebanyak 10 orang (10%) berpendidikan SMP,sebanyak 40 orang (43%) berpendidikan SMA/SMK, sebanyak 4 orang (4%) berpendidikan D II- D III, dan sebanyak 36 orang (39%) berpendidikan Strata Satu (SI)

### 3. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai identitas responden, maka berikut ini penulis akan menguraikan:

**Tabel V.3 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Pria	74 responden	78%
2.	Wanita	20 responden	22 %
	Jumlah	94 responden	100%

**Sumber : Olahan Data Tahun 2018**

Berdasarkan table diats V.3 dapat diketahui identitas responden berdasarkan pendidikan adalah sebanyak dari 94 dijadikan responden sebanyak 74 orang (78%) berjenis kelamin laki-laki, dan sebanyak 20 orang (22%) berjenis kelamin perempuan.

## B Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Pangkalan Lesung

Salah satu urusan camat adalah menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dengan baik. Memberikan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dari camat.

Menurut Manullang (2008:72) kriteria koordinasi adalah mengadakan pertemuan resmi, mengangkat suatu tim, membuat buku pedoman, dan mengadakan pertemuan informal. Maka dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan pelaksanaan tugas camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Di kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

### 1. Mengadakan Pertemuan Resmi.

Dalam hal ini bagaimana camat mengadakan pertemuan resmi kepada masyarakat untuk ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Pangkalan Lesung.

Untuk melihat jawaban masyarakat mengenai mengadakan pertemuan resmi sebagai berikut

**Tabel V.4 : Tanggapan Responden Masyarakat Kecamatan Pangkalan Lesung.**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Mengadakan Musyawarah	12	14	24	50
2	Mengadakan Kerja Sama	0	18	32	50
3	Mengadakan Pertemuan	22	24	4	50

Jumlah	34	56	60	150
Rata-Rata	11	19	20	50
Persentasi	22%	38%	40%	100%

**Sumber olahan data tahun 2018**

dapat dijelaskan bahwa dari ketiga item penilain indikator, responden yang menjawab mengadakan musyawarah adalah 12 responden mengatakan Terlaksana, kemudian 14 orang mengatakan Cukup Terlaksana, dan 24 orang mengatakan Tidak Terlaksana. Kemudian utuk item penilaian mengadakan kerja sama adalah 0 responden mengatakan Terlaksana, kemudian 18 responden mengatakan Cukup Terlaksana dan 32 responden mengatakan Tidak Terlaksana. Sedangkan untuk item penilaian Mengadakan Pertemuan adalah 22 responden mengatakan Terlaksana. Kemudian 24 responden mengatakan Terlaksana, dan 2 responden mengatakan Tidak Terlaksana.

Berdasarkan tanggapan responden dari masyarakat Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan mengenai *mengadakan pertemuan resmi* adalah dari 50 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 11 orang (22%) menyatakan Terlaksana, sebanyak 19 orang (38%) menyatakan Cukup Terlaksana, dan sebanyak 20 orang (40%) menyatakan Tidak Terlaksana. Berdasarkan tanggapan responden diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya mengadakan pertemuan resmi apat dikatakan *Tidak Terlaksana*. hal ini dilihat dari tidak adanya kerja sama

yang dibuat oleh camat kepada masyarakat dalam melaksanakan ketertiban dan ketentraman.

Selanjutnya tanggapan dari pegawai kecamatan pangkalan lesung kabupaten pelalawan mengenai mengadakan pertemuan resmi sebagai berikut :

**Tabel V.5 : Tanggapan Responden Pegawai Kecamatan Pangkalan Lesung**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Mengadakan Musyawarah	14	18	12	44
2	Mengadakan Kerja Sama	9	22	13	44
3	Mengadakan Pertemuan	0	28	16	44
	1	2	3	4	5
	Jumlah	23	68	41	132
	Rata-Rata	8	23	13	44
	Persentase	18%	53%	29%	100%

Sumber olahan data tahun 2018

Dari Penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa dari ketiga item penilain indikator, responden yang menjawab mengadakan musyawarah adalah 14 responden mengatakan Terlaksana, kemudian 18 orang mengatakan Cukup Terlaksana,dan 12 orang mengatakan Tidak Terlaksana. Kemudian utuk item penilaian mengadakan kerja sama adalah responden mengatakan Terlaksana, kemudian 22 Cukup Terlaksana dan 13 responden mengatakan Tidak Terlaksana. Sedangkan untuk item penilaian Mengadakan Pertemuan adalah 0 responden mengatakan

Terlaksana. Kemudian 28 responden mengatakan Terlaksana, dan 16 responden mengatakan Tidak Terlaksana.

Berdasarkan tanggapan responden dari Pegawai Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan mengenai *mengadakan pertemuan resmi* adalah dari 40 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 8 orang (18%) menyatakan Terlaksana, sebanyak 23 orang (53%) menyatakan Cukup Terlaksana, dan sebanyak 13 orang (29%) menyatakan Tidak Terlaksana. Berdasarkan tanggapan responden diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya mengadakan pertemuan resmi dapat dikatakan *Cukup Terlaksana*. hal ini dilihat dari tidak adanya kerja sama yang dibuat oleh camat kepada masyarakat dalam melaksanakan ketertiban dan ketentraman.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 23 november 2018, tidak adanya pertemuan resmi yang di adakan pihak kecamatan untuk membahas ketentraman dan ketertiban kususnya perjudian yang semakin marak di kecamatan Pangkalan Lesung sehingga sudah meresahkan para warga.

Berdasarkan hasil wawan cara yang dilakukan penulis pada tanggal 23 november 2018 dengan H. Adnan Selaku camat tentang pelaksanaan pertemuan resmi yang dilakukannya, bahwa :

“pertemuan resmi inilah salah satu dari agenda saya dalam mengkoordinasikan pekerjaan kepada staf saya bahkan ke unit istansi yang terkait.hanya saja pada saat saya melakukan pertemuan resmi ( rapat ) ada yang tidak datang beberapa kepala desa tidak bisa hadir ini

dikarnakan ada kesibukan yang mereka miliki dan ini lah yang menyebabkan koordinasi saya tidak sampai secara sempurna.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 25 November 2018 dengan Kepala Sektor Pangkalan lesung Iptu Nazaruddin mengenai pelaksanaan pertemuan resmi yang di lakukan adalah :

” jadi gini kamikan dari pihak kepolisian yang tugasnya mengayomi masyarakat dan melindungi masyarakat itu memang tugas kami. Tapi apabila pihak kecamatan meminta bantuan kekami ,kami siap membantu tapikan pada saat ini pihak camat belum melakukan hal itu,dan kamipun bekerja atas laporan yang kami terima dari masyarakat.

Dari hasil kuisisioner dan wawancara yang penulis lakukan kepada responden mengenai mengadakan pertemuan resmi yang dilakukan pihak camat kepada instansi terkait dapat dikatakan cukup baik. Dan ini terlihat juga dari hasil wawancara penulis kepada bapak camat hanya saja camat kurang berkoordinasi kepada pihak kapolsek dalam melakukan pertemuan resmi untuk membahas masalah-masalah keamanan yang ada dikecamatan Pangkalan Lesung.

Berdasarkan temuan dilapangan penulis penulis dapat memberikan suatu penjelasan mengenai mengadakan musyawarah atau rapat rutin yang diselenggarakan oleh camat dengan para kepala desa beserta jajaranya dan musyawarah ini pun dilakukan rutin satu bulan sekali , dan untuk mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak atau instansi terkait kususnnya dalam menyelenggarakan keamanan dan ketrtiban umum camat bekerja sama dengan kepala desa untuk membentuk linmas dan pos kamling, sedangkan untik mengadakan pertemuan dengan membahas

masalah dalam menyelesaikan masalah masyarakat jarang sekali di ikut sertakan dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada di desanya masing-masing.

## 2. Mengangkat Suatu Tim

Dalam hal ini menilai bagai mana mengangkat suatu tim untuk ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Untuk melihat jawaban masyarakat kecamatan pangkalan lesung mengenai pengangkatan suatu tim dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat dilihat pada table berikut

**Tabel V.6 : Tanggapan Responden Masyarakat Kecamatan Pangkalan Lesung.**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Membentuk Suatu Tim	0	16	34	50
2	Melaksanakan Prosedur	2	40	8	50
3	Memberikan Rincian Tugas	8	32	10	50
Jumlah		20	88	52	150
Rata-Rata		3	30	17	50
Persentasi		6%	60%	34%	100%

Sumber olahan data tahun 2018

Berdasarkan tabel V.6 di atas dapat dijelaskan bahwa dari ketiga item penilain indikator, responden yang menjawab Membuat Suatu Tim adalah 0 responden mengatakan Terlaksana, kemudian 16 orang mengatakan Cukup Terlaksana,dan 34 orang mengatakan Tidak

Terlaksana. Kemudian untuk item penilaian Melaksanakan Prosedur adalah 2 responden mengatakan Terlaksana, kemudian 40 responden mengatakan Cukup Terlaksana dan 8 responden mengatakan Tidak Terlaksana. Sedangkan untuk item penilaian Memberikan Rincian Tugas adalah 8 responden mengatakan Terlaksana. Kemudian 32 responden mengatakan Terlaksana, dan 10 responden mengatakan Tidak Terlaksana.

Berdasarkan tanggapan responden dari masyarakat Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan mengenai *mengangkat suatu tim* adalah dari 50 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 3 orang (6%) menyatakan Terlaksana, sebanyak 30 orang (60%) menyatakan Cukup Terlaksana, dan sebanyak 17 orang (34%) menyatakan Tidak Terlaksana.. Berdasarkan tanggapan responden diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya mengangkat suatu dapat dikatakan *Cukup Terlaksana*

Selanjutnya tanggapan dari pegawai kecamatan pangkalan lesung kabupaten pelalawan mengenai mengadakan pertemuan resmi sebagai berikut :

**Tabel V.7 : Tanggapan Responden Pegawai Kecamatan Pangkalan Lesung**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Membentuk Suatu Tim	0	8	36	44
2	Melaksanakan	16	28	0	44

	Prosedur				
3	Memberikan Rincian Tugas	12	21	11	44
Jumlah		28	57	47	132
Rata-Rata		9	19	16	44
Persentase		20%	43%	37%	100%

**Sumber olahan data tahun 2018**

Berdasarkan tabel V.7 di atas dapat dijelaskan bahwa dari ketiga item penilain indikator, responden yang menjawab Membuat Suatu Tim adalah 0 responden mengatakan Terlaksana, kemudian 8 orang mengatakan Cukup Terlaksana, dan 36 orang mengatakan Tidak Terlaksana. Kemudian untuk item penilaian Melaksanakan Prosedur adalah 16 responden mengatakan Terlaksana, kemudian 28 responden mengatakan Cukup Terlaksana dan 0 responden mengatakan Tidak Terlaksana. Sedangkan untuk item penilaian Memberikan Rincian Tugas adalah 12 responden mengatakan Baik. Kemudian 21 responden mengatakan Terlaksana, dan 11 responden mengatakan Tidak Terlaksana.

Berdasarkan tanggapan responden dari masyarakat Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan mengenai *mengangkat suatu tim* adalah dari 44 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 9 orang (20%) menyatakan Terlaksana, sebanyak 19 orang (43%) menyatakan Cukup Terlaksana, dan sebanyak 16 orang (37%) menyatakan Tidak Terlaksana.. Berdasarkan tanggapan responden diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya mengangkat suatu tim dapat dikatakan *Cukup Terlaksana*

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 23 november 2018 tidak adanya pihak kecamatan membuat suatu tim untuk melaksanakan tugas ketentraman dan ketertiban di kecamatan Pangkalan Lesung yang saat ini mulai maraknya aksi aksi perjudian di beberapa desa di kecamatan Pangkalan Lesung..

berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 23 november 2018 dengan H.Adnan selaku camat Pangkalan Lesung tentang mengangkat suatu tim yaitu :

“ ya kalau untuk membuat tim kusus yang tugasnya untuk menjaga ketentraman, itu belum ada. hanya saja saya sudah mengkoordinasikan kepada para kepala desa untuk mengadakan ronda tiap malam , hanya saja ini tidak berjalan dengan baik , karna banyak sekali masyarakat yang tidak mau ikut ronda dikarenakan luasnya desa-desa yang ada di kecamatan pangkalan lesung.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 25 november 2018 dengan kepolisian sektor Iptu Nazaruddin mengenai pengangkatan tim kusus, beliau mengatakan :

“ untuk diinternal dikami ada tim kusus yang kami siapkan dalam melakukan keamana dan ketertiban di kecamatan pangkalan lesung. Tapi kalau untuk pembuatan tim kusus yang berkerja sama dengan pihak kecamatan maupun instasi terkait ini yang belum ada, dan sebaiknya kita harus mengangkat tim kusus biar kemanan kita lebih terjaga”.

Berdasarkan hasil kuisioner dan wawancara yang penulis lakukan kepada responden mengenai pengangkatan suatu tim yang dilakuan pihak camat dengan instasi lain yaitu kurang baik. Dan hasil wawancara yang penulis lakukan mengenai pengangkatan sautu tim ini belum ada sama sekali di bentuk, dan sebaiknya pihak camat harus membentuk tim kusus

dalam meningkatkan keamana dan ketertiban di kecamatan Pangkalan Lesung.

Berdasarkan temuan dilapangan penulis dapat memberikan suatu penjelasan mengenai membentuk suatu tim dalam penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum, camat juga sudah membuat sebuah linmas dimana anggota linmas pada saat ini berjumlah 81 orang hannya saja linmas ini tidak bekerja secara optimal. Untuk temuan penulis dilapangan memberikan suatu penjelasan mengenai melaksanakan prosedur kerja dalam menjalankan suatu tugas-tugas camat sudah melakukan prosedur kerja dengan baik ini dilihat adanya pertemuan rutin dengan kepela desa dan instasi terkait. Sedangkan untuk memberikan rincian tugas penulis dapat menjelaskan camat sudah melakukan pembagian tugas kemasing-masing sub bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing.

### **3. Membuat Buku Pedoman**

Untuk menilai tingkat pelaksanaan indikator membuat buku pedoman sebagai bagian acauan dari kegiatan koordinasi camat dalam penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum, maka dapat dilihat dari tanggapan responden sebagai berikut

**Tabel V.8 : Tanggapan Responden Masyarakat Kecamatan Pangkala Lesung.**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Penjelasan Tugas	18	23	9	50
2	Adanya Tujuan Yang Akan Dicapai	7	28	15	50
3	Melakukan Bimbingan	0	19	31	50
	Jumlah	25	70	55	150
	Rata-Rata	8	24	18	50
	Persentasi	16%	48%	36%	100%

**Sumber olahan data tahun 2018**

Di atas dapat dijelaskan bahwa dari ketiga item penilain indikator, responden yang menjawab Penjelasan Tugas adalah 18 responden mengatakan Terlaksana, kemudian 23 orang mengatakan Cukup Terlaksana, dan 9 orang mengatakan Tidak Terlaksana. Kemudian untuk item penilaian Adanaya Tujuan Yang Akan Dicapai adalah 7 responden mengatakan Terlaksana, kemudian 28 responden mengatakan Cukup Terlaksana dan 15 responden mengatakan Tidak Terlaksana. Sedangkan untuk item penilaian Melakukan Bimbingan adalah 0 responden mengatakan Terlaksana. Kemudian 19 responden mengatakan Terlaksana, dan 31 responden mengatakan Tidak Terlaksana.

Berdasarkan tanggapan responden dari masyarakat Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan menegani *membuat buku*

*pedoman* adalah dari 50 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 8 orang (16%) menyatakan Terlaksana, sebanyak 24 orang (48%) menyatakan Cukup Terlaksana, dan sebanyak 18 orang (36%) menyatakan Tidak Terlaksana. Berdasarkan tanggapan responden diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya membuat buku pedoman dapat dikatakan *Cukup Terlaksana*.

Selanjutnya tanggapan dari pegawai Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan mengenai membuat buku pedoman sebagai berikut:

**Tabel V.9 : Tanggapan Responden Pegawai Kecamatan Pangkalan Lesung.**

No	Item Penilaian				Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Penjelasan Tugas	14	30	0	44
2	Adanya Tujuan Yang Akan Dicapai	4	11	29	44
1	2	3	4	5	6
3	Melakukan Bimbingan	0	12	32	44
<b>Jumlah</b>		18	53	61	132
<b>Rata-Rata</b>		6	18	20	44
<b>Persentase</b>		14 %	41%	45%	100%

Sumber olahan data tahun 2018

Berdasarkan tabel V.9 di atas dapat dijelaskan bahwa dari ketiga item penilai indikator, responden yang menjawab Penjelasan Tugas

adalah 14 responden mengatakan Terlaksana, kemudian 30 orang mengatakan Cukup Terlaksana, dan 0 orang mengatakan Tidak Terlaksana. Kemudian untuk item penilaian Adanya Tujuan Yang Akan Dicapai adalah 4 responden mengatakan Terlaksana, kemudian 11 responden mengatakan Cukup Terlaksana dan 29 responden mengatakan Tidak Terlaksana. Sedangkan untuk item penilaian Melakukan Bimbingan adalah 0 responden mengatakan Terlaksana. Kemudian 12 responden mengatakan Terlaksana, dan 32 responden mengatakan Tidak Terlaksana.

Berdasarkan tanggapan responden dari masyarakat Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan mengenai *membuat buku pedoman* adalah dari 44 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 6 orang (14%) menyatakan Terlaksana, sebanyak 18 orang (41%) menyatakan Cukup Terlaksana, dan sebanyak 20 orang (54%) menyatakan Tidak Terlaksana. Berdasarkan tanggapan responden di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya *membuat buku pedoman* dapat dikatakan *Cukup Terlaksana*. Hal ini dilihat dari adanya buku pedoman yang dimiliki setiap kepala bagian dalam menjalankan tugas dan fungsi yang semestinya

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 23 November 2018, setiap sub bidang yang ada di kantor kecamatan memiliki buku pedoman yang mana isi buku pedoman itu menjelaskan dengan rinci tugas-tugas dan fungsi masing-masing sub bagian sehingga mereka bekerja dengan semestinya.

berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 23 november 2018 dengan H.Adnan selaku camat pangkalan lesung tentang membuat buku pedoman yaitu :

” pembagian buku pedoman memang sudah ada kami lakukan, namun untuk saat ini hanya buku pedoman untuk pembagian kerja masing-masing bagian aja. Dan dimana nantinya kami akan membuat buku pedoman yang sifatnya menyangkut kriminalitas langsung kita koordinasi dengan pihak kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 25 november 2018 dengan kepolisian sektor Iptu Nazaruddin mengenai pengangkatan tim kasus, beliau mengatakan :

“kami ini dari unsur kepolisian ada buku pedoman kasus berupa catatan untuk kasus-kasus yang ada di kecamatan pangkalan lesung baik itu kecelakaan, perjudian, perampokan/ pencurian dan aksi-aksi kriminal lainnya, dan saat ini angka aksi perjudian kita sangat meningkat ketimbang tahun lalu yang mana tahun lalu cuman ada 8 kasus dan tahun 2018 ini kita udah menangani 11 kasus perjudian 5 kasus pencurian.”

Berdasarkan hasil kuisioner dan wawancara yang penulis lakukan kepada responden mengenai Pembuatan Buku pedoman tugas adalah Baik sedangkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat dikatakan Baik. Ini dapat dilihat dari setiap sub bagian di pegawai kantor camat memegang buku pedoman yang mengenai tugas masing-masing sub bagian, dan camat akan membuat buku pedoman untuk kasusu kriminalitas yang bekerja sama langsung dengan pihak kepolisian.

Berdasarkan temuan dilapangan penulis dapat memberikan suatu penjelasan mengenai dalam penjelasan suatu tugas camat selalu

memberikan suatu arahan tugas dengan baik dimana dalam suatu permasalahan camat menjelaskan tugas atau langkah- langkah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Untuk adanya tujuan yang akan di capai penulis dapat memberikan penjelasan , banyaknya laporan masyarakat mengenai pencurian dan perjudian camat akan membuat suatu tim khusus yang bekerja sama dengan kapolsek demi tujuan supaya masyarakat tidak mengalami keresahan . sedangkan untuk memberikan bimbingan camat sudah mulai menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan perjudian yang bisa mengakibatkan tindakan kriminal.

#### 4. Mengadakan Pertemuan Informal

Untuk menilai tingkat pelaksanaan indikator mengadakan pertemuan informal sebagai bagian dari kegiatan koordinasi camat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, maka dapat dilihat dari tanggapan responden sebagai berikut

**Tabel V.10 : Tanggapan Responden Masyarakat Kecamatan Pangkalan Lesung.**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Memberikan Pengarahan	12	21	17	50
2	Melakukan Konsultasi	0	23	27	50
3	Membuat Instruksi Lisan Maupun Tulisan	32	18	0	50
Jumlah		44	62	44	150
Rata-Rata		15	21	14	50
Persentasi		30%	42%	28%	100%

Dijelaskan bahwa dari ketiga item penilai indikator, responden yang menjawab Memberikan Pengarahan adalah 12 responden mengatakan Terlaksana, kemudian 21 orang mengatakan Cukup Terlaksana, dan 17 orang mengatakan Tidak Terlaksana. Kemudian untuk item penilaian Melaksanakan Konsultasi adalah 0 responden mengatakan Terlaksana, kemudian 23 responden mengatakan Cukup Terlaksana dan 27 responden mengatakan Tidak Terlaksana. Sedangkan untuk item penilaian Membuat Instruksi Lisan Maupun Tulisan adalah 32 responden mengatakan Terlaksana. Kemudian 18 responden mengatakan Terlaksana, dan 0 responden mengatakan Tidak Terlaksana

Berdasarkan tanggapan responden dari masyarakat Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan mengenai *mengadakan pertemuan resmi* adalah dari 50 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 15 orang (30%) menyatakan Terlaksana, sebanyak 21 orang (42%) menyatakan Cukup Terlaksana, dan sebanyak 14 orang (28%) menyatakan Tidak Terlaksana. Berdasarkan tanggapan responden diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya mengadakan pertemuan informal dapat dikatakan *Cukup Terlaksana*. hal ini dilihat dari adanya arahan dari pihak camat kepada masyarakat untuk melakukan ronda tiap malamnya dan adanya instruksi lisan maupun tulisan untuk menjaga ketentraman di kecamatan Pangkalan Lesung.

Selanjutnya tanggapan dari pegawai Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan mengenai membuat buku pedoman sebagai berikut:

**Tabel V.11 : Tanggapan Responden Masyarakat Kecamatan Pangkalan Lesung.**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Memberikan Pengarahan	12	21	11	44
1	2	3	4	5	6
2	Melakukan Konsultasi	4	19	21	44
3	Membuat Instruksi Lisan Maupun Tulisan	7	32	5	55
	Jumlah	23	72	37	132
	Rata-Rata	8	24	12	44
	Persentase	18%	55%	27%	100%

Sumber olahan data tahun 2018

Berdasarkan tabel V.11 di atas dapat dijelaskan bahwa dari ketiga item penilain indikator, responden yang menjawab Memberikan Pengarahan adalah 12 responden mengatakan Terlaksana, kemudian 21 orang mengatakan Cukup Terlaksana,dan 11 orang mengatakan Tidak Terlaksana. Kemudian utuk item penilaian Melaksanakan Konsultasi adalah 4 responden mengatakan Terlaksana, kemudian 19 responden mengatakan Cukup Terlaksana dan 21 responden mengatakan Tidak Terlaksana. Sedangkan untuk item penilaian Membuat Instruksi Lisan

Maupun Tulisan adalah 7 responden mengatakan Terlaksana. Kemudian 32 responden mengatakan Terlaksana, dan 5 responden mengatakan Tidak Terlaksana.

Berdasarkan tanggapan responden dari masyarakat Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan mengenai *mengadakan pertemuan resmi* adalah dari 50 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 8 orang (18%) menyatakan Terlaksana, sebanyak 24 orang (55%) menyatakan Cukup Terlaksana, dan sebanyak 12 orang (27%) menyatakan Tidak Terlaksana. Berdasarkan tanggapan responden di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya mengadakan pertemuan informal dapat dikatakan *Cukup Terlaksana*. Hal ini dilihat dari adanya arahan dari pihak Camat kepada masyarakat untuk melakukan ronda tiap malamnya dan adanya instruksi lisan maupun tulisan untuk menjaga ketentraman di kecamatan Pangkalan Lesung.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 23 November 2018, dalam melakukan pertemuan informal. Camat rutin mengadakan pertemuan informal dengan penghulu dan instansi terkait baik untuk membahas program-program yang dimiliki kecamatan baik dari segi ketertiban, fasilitas umum maupun administrasi.

berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 23 November 2018 dengan H. Adnan selaku Camat Pangkalan Lesung tentang membuat buku pedoman yaitu :

”mengadakan pertemuan informal memang selalu saya lakukan, biasanya dalam sebulan satu kali pasti ada, dalam pertemuan ini saya

bisa melakukan pengarahan maupun konsultasi dengan langsung kepada tokoh masyarakat mengenai permasalahan yang ada, seperti lemahnya kesadaran masyarakat dan peran masyarakat dalam menciptakan ketrtiban .”

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 25 november 2018 dengan kepolisian sektor Iptu Nazaruddin mengenai pengangkatan tim kusus, beliau mengatakan :

“pertemuan yang sifatnya informal pernah dilakukan dengan camat Pangkalan Lesung dengan pihak kami. Sebelum puasa kemarin itu kami mengadakan pertemuan informal dimana kami membahas untuk menutup tempat-tempat yang kami nilai adanya perjudian di situ contohnya di tempat billiard, desa-desa yang memiliki sambung ayam. Rumah-rumah yang biasanya dijadikan tempat main kartu” .

Berdasarkan hasil kuisioner dan wawancara yang penulis lakukan kepada responden mengenai mengadakan pertemuan informal adalah Baik sedangkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat dikatakan Baik. Ini dapat dilihat dari setiap bulanya camat melakukan pertemuan informal baik diunit instansinya maupun melibatkan instasi lain dan membahas permasalahan-permasalahan yang ada dikecamatan pangkalan lesung, baik itu keamanan dan ketertiban maupun fasilitas sarana prasarana yang ada di lingkungan kecamatan pangkalan lesung.

Berdasarkan temuan dilapangan penulis dapat memberikan suatu penjelasan mengenai memberikan pengarahan dimana camat memberikan suatu pengarahan dalam suatu pertemuan dan arahan itu ditujukan kepada kepala desa untuk mengaktifkan kembali linmas dan pos kamling. Untuk melakukan konsultasi penulis dapat menjelaskan dalam permasalahan

ketentraman dan ketertiban ini camat belum ada berkonsultasi kepada pihak kapolsek dalam menyelesaikan permasalahan ini. Sedangkan untuk membuat instruksi lisan maupun tulisan ini dilakukan camat dalam menghadirkan kepala desa serta instansi terkait untuk mengadakan pertemuan demi membahas permasalahan yang ada.

### C Rekapitulasi Hasil Pembahasan

Berdasarkan penjelasan dan urian dari keempat indikator yang digunakan untuk melihat Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Pangkalan Lesung, maka dapat dilihat rekapitulasi jawaban keseluruhan responden sebagai berikut :

**Tabel V. 12. : Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Empat Indikator**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Mengadakan Pertemuan Resmi	9	42	33	94
2	Mengangkat Suatu Tim	12	49	33	94
3	Membuat Buku Pedoman	14	42	38	94
4	Mengadakan Pertemuan Informal	23	45	26	94
<b>Jumlah</b>		58	178	150	336
<b>Rata-Rata</b>		14	44	36	94
<b>Persentase</b>		15%	47%	38%	100%

Sumber olahan data tahun 2018

Berdasarkan tabel V.12 data diatas dapat diketahui bahwa rekapitulasi tanggapan responden mengenai Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan adalah 94 orang yang dijadikan responden sebanyak 14 orang (15%) menyatakan Terlaksana sebanyak 44 orang (47%) menyatakan Cukup Terlaksana dan sebanyak 36 orang (36%) menyatakan Kurang Terlaksana.

Maka dari rekapitulasi tanggapan responden diatas dapat disimpulkan bahwasanya Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Pangkalan Lesung adalah dapat dikatakan CUKUP TERLAKSANA dilihat dari empat indikator mengadakan pertemuan resmi, mengangkat suatu tim, membuat buku pedoman dan mengadakan pertemuan informasi hasil rekapitulasinya sebanyak 44 orang (47%), dimana Camat yang tugasnya mencakup pelaksanaan ketentraman dan ketertiban dipangkalan lesung kurang maksimal, karena dapat terlihat dari kurangnya kesadaran masyarakat arti penting menjaga ketertiban dilingkungannya serta menjaga menjauhi perjudian yang bisa mengakibatkan dampak-dampak negatif yang begitu besar.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis melihat kurang terlaksananya koordinasi yang dilakukan oleh Camat dengan instansi terkait seperti kepolisian republik indonesia, tentara nasional indonesia, pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam upaya

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dikecamatan pangkalan lesung kabupaten pelalawa, karna disini penulis melihat masih adanya pelanggaran-pelanggaran ketentraman dan ketertiban dalam kurun berapa tahun terakhir di 10 desa yang ada dikecamatan pangkalan lesung, terlebih lagi penulis melihat belum adanya tindakan yang dilakukan oleh pihak kecamatan dalam menyelesaikan permasalahan di kecamatan pangkalan lesung.

#### **D Faktor-Faktor Penghambat Camat Sebagai Koordinator Pelaksana Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.**

Camat dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya diwilayah tertentu tidak bisa bekerja sendiri. Camat juga harus melakukan koordinasi vertikal maupun horizontal, koordinasi ini sudah menjadi permasalahan pemerintah yang harus segera dibenahi secara serius dan lakukan secara berkelanjutan agar tidak menjadi masalah yang besar di kemudian hari.

Berdasarkan hasil analisis dari tabel rekapitulasi jawaban responden dan hasil wawancara dengan responden,peneliti mendapatkan beberapa faktor yang menghambat camat dalam upaya mengkoordinasikan pelaksanaan ketentramana dan ketertiban umum di kecamatan pangkalan lesung diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya komunikasi dan pertemuan – pertemuan baik secara formal maupun secara informal antara camat dengan kapolsek , kepala desa untuk berkoordinasi mengenai penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban dikecamatan pangkalan lesung sehingga program-program mengenai ketentraman dan ketertiban kurang terlaksana.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami arti penting menjaga ketentraman dan ketertiban khususnya perjudian. Karna sosialisasi akan meningkatkan kesadaran masyarakat bahaya dari perjudian yang menyebabkan tindakan kriminal.
3. Banyaknya program prioritas pemerintah di daerah kabupaten pelalawan sehingga membuat camat tidak memfokuskan program ketentraman dan ketertiban .



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan pangkalan lesung adalah dapat dikatakan Cukup Baik, dilihat dari empat indikator yaitu Mengadakan pertemuan resmi, Mengangkat suatu tim, Membawa Buku Pedoman, dan Mengadakan Pertemuan Informal dengan memperoleh hasil rekapitulasi ( cukup baik ).
2. Adapun faktor yang menghambat atau mejadi kendala bagi camat pangkalan lesung dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dikecamatan pangkalan lesung adalah
  - a. Kurangnya komunikasi dan pertemuan – pertemuan baik secara formal maupun secara informal antara camat dengan kapolsek , kepala desa untuk berkoordinasi mengenai penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dikecamatan pangkalan lesung sehingga program-program mengenai ketentraman dan ketertiban kurang terlaksana.
  - b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami arti penting menjaga ketentraman dan ketertiban kususnya perjudian yang bisa menyebabkan timbulnya aksi kekerasan dan pencurian

- c. Banyaknya program prioritas pemerintah di daerah kabupaten pelalawan sehingga membuat camat tidak memfokuskan program ketentraman dan ketertiban .

## **B. Saran**

1. Camat perlu memberikan pengarahan yang lebih kepada instasai terkait yang ikut dalam koordinasi terutama kepada aparat kepolisian yang disiapkan untuk menelusuri setiap desa yang ada dikecamatan Pangkalan Lesung.
2. Diharapkan camat mampu membuat rencana kerja terkhususnya dalam pelaksanaan dan ketertiban dikecamatan dan memberikan sosialisai bagi masyarakat kususnya pemuda-pemuda kecamatan pangkalan lesung bahaya dari kecanduan judi.
3. Diharapkan camat dapat mengadakan pertemuan atau rapat secara rutin dengan istasi terkait dan seluruh unsur masyarakat dalam membahas kententraman dan ketertiban yang ada di kecamatan Pangkalan Lesung

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdussalam, 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Restu Agung
- Budiarjo, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu politik*, jakarja : gamedia
- Farland soewarno Handayaniingrat:1991. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen* . Jakarta: erlangga
- Harold koonts (S.P,Siagian,2005: 124). *Menejemen*.Jakarta : Erlangga
- Lilik ekawati, 2005. *Perencanaan,implementasi,dan Evaluasi kebijakan program teoritik dan praktis*. Pustaka Cakra, Surakarta
- Manullang , 2008, *Dasar – Dasar Manajemen*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia.
- Moekijat, 1998. *Analisis Jabatan* , Bandung : Mandar Maju
- Moenir, H. A. S, 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Ndraha,Taliziduhu, 2011. *Kybernology ( Ilmu Pemerintahan Baru )* ,2. Jakarta : Renika Cipta
- ,2003. *Kybornology ( Ilmu Pemerintahan)*, 2. Jakarta : Renika Cipta
- Nurcholis,2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo:Jakarta
- P. Siagian, Sondang, 2002. *Kepemimpinan Organisasi & Prilaku Administrasi*, Jakarta : Penerbit Gunung Agung.
- Rasyid.2002. *Otonomi daerah dalam suatu negara*. Yogyakarta: pustaka pelajar
- Riduan, 2005. *Skala Pengukuran Variabel-variabel penelitian*. Bandung. CV Alfabet.
- Yasyin,suchlan,1995.*Kamus pintar Bahasa Indonesia*,Surabaya,amanah
- Salim,peter.2002. *Kamus bahasa indonesia kontemporer*. Jakarta: modern english press
- Soekanto, Soejono, 2012. *Sosiologi suatu Pengantar* . Jakarta : Rajawali Pers
- Syafiie inu kencana,DR. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta. Jawa Barat
- Syaukani,2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Stoner.1986. *Manajemen*. Jakarta:Erlangga

Widjaja, 1992. *Suatu pengantar*. Jakarta : Rineka Cipta.

Zulkifli,Amsyah, 2005. *Manajemen Sistem Informasi*.Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

**Dokumentasi:**

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau